

**ANALISA POTENSI EKONOMI KABUPATEN GAYO LUES  
PASCA KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : ISMAIL SARAINI**  
**NPM : 1405180075-P**  
**Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : ISMAIL SARAINI  
NPM : 1405180075-p  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISA POTENSI EKONOMI KABUPATEN GAYO LUES PASCA KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

(Dra. ROSITA HAFNI, M.Si)

**PENGUJI II**

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

**Pembimbing**

(Dra. HJ. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

H. JANURI, S.E, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ISMAIL SARAINI  
N.P.M : 1405180075P  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISA POTENSI EKONOMI KABUPATEN GAYO  
LUES PASCA KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 14 Maret 2019

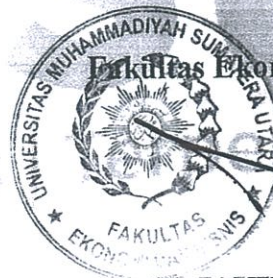
Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk kedua orang tua penulis .Satu satu nya hal yang aku miliki yang paling berharga dalam hidup ini adalah kedua orang tua ku tanpa kalian aku tak mungkin ada di sini terima kasih ayah kau telah menjadi ayah yang sempurna untuk aku terimakasih ibu kau telah menjadi ibu yang sempurna untuk aku tanpa kalian hidup ku terasa hampaterima kasih atas warna yang telah engkau kibarkan dalam hidup kuterima kasih atas jasa jasa yang kalian berikan untuk akuterima kasih atas pengorbanan dan perjuangan kalian untuk aku terima kasih telah melahirkan aku kedunia initerimakasih telah mengizinkan aku untuk menjadikan bagian dalam hidup kalianayah terima kasih karna kau telah memberi aku nafasdari aku lahir hingga saat inikau terus berjuang demi menghidupi keluargamu termasuk akuibu terima kasih karena kau telah merawatkusampai saat ini aku hidup karena ibulah yang memberi aku makan danminum ibulah yang menjaga ku siang dan malamterima kasih ayah terima kasih ibutelah menjadikan aku anak yang soleh/aaku berjanji akan selalu menjaga dan melindungi ayah dan ibudi saat waktunya tibadi saat ayah dan ibu tak mampu lagi untuk berjalan di saat ayah dan ibu tak mampu lagi untuk bekerja aku akan menggantikan muaku akan merawat mudan aku akan menjaga kalian sampai kalian terlelap tidurayah maafkan akuibu maafkan aku karena aku terkadang selalu membantah perintah mu maafkan aku atas segala ke khilafan ku maafkan aku karena aku tak bermaksud untuk melukai hati mu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur khadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan merampungkan skripsi dengan judul: Analisa Potensi Ekonomi Di Kabupaten Gayo Lues Pasca Kebijakan Otonomi Khusus. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhamddyah Sumatera Utara

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus tulus untuk kepada kedua orang tua tercinta saya ayah Daud dan ibu Kasum yang telah mencurahkan kasih sayang nya baik itu berbentuk moril maupun materil semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, Karunia dan Kebaikan dunia akhirat kepada kedua orang tua atas budi baik yang telah di berikan kepada penulis

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada ibu Dra Hj Lailan Safina Hasibuan M,Si. Selaku pembimbing dalam membantu penulis mengerjakan penulisan skripsi dan kepada Ibu Dr Prawidya Hariani Rs sebagai ketua prodi Ekonomi Pembangunan Fakulatas Ekonomi Bisnis Universitas Muhamddyah Sumatera utara yang telah membantu penulis dalam penulisa skripsi

Penulis  
Medan 12 Maret 2019

Ismail Saraini

## ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah Negara yang di Pimpin oleh Kedaulatan sistem Demokrasi dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang di mana kepentingan Rakyat di atur oleh Pemerintah Indonesia baik itu hukum, ekonomi dan lain nya. Pada kejadian ini menyebabkan banyak terjadi peberontakan yang di lakukan di Wilyah Timur dan Barat indonesia yang bertujuan untuk meisahkan diri darikesatuan indonesia karna ketidakadilan pemerintah indonesia maka dari itu pemerintah mebuat kebijakan “DESENTRALISASI” Ekonomi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dan pemberian dana otonomi Khusus untuk wilayah tertentu. Sektor, menganalisis perkembangan otonomi khusus pada 7 sector pembangunan . Ekonomi di Kabupaten Gayo Lues yang potensi perkembangannya lebih cepat dibandingkan daerah lain di Propinsi Aceh adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menjadi sektor yang unggul dalam persaingan di masa depan. Dari uji LQ dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang non basis (hasil uji LQ), menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Beberapa sektor ekonomi yang pada periode sebelum otonomi khusus daerah (2010-2017) diharapkan mampu menjadi sektor yang unggul dalam persaingan di masa depan, ternyata mengalami pertumbuhan melambat pada periode setelah pelaksanaan otonomi khusus daerah (2010-2017). Sektor tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor yang mengalami perkembangan cepat adalah sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan.

Kata Kunci : Potensi Ekonomi ,Otonomi Khusus

## ABSTRAC

*Indonesia is a country that is led by the sovereignty of the democratic system and is based on Pancasila and the 1945 Constitution in which the interests of the people are regulated by the Indonesian government, whether legal, economic or otherwise. In this event, there was a lot of rebellion which was carried out in the East and West Indonesia regions which aimed to separate themselves from the Indonesian unity because of the injustice of the Indonesian government. Therefore the government made an economic "DECENTRALIZATION" policy, namely the transfer of government affairs from the center to the regions. The delegation of authority is solely aimed at realizing a more effective and efficient government and the provision of Special autonomy funds for certain regions. Sector, analyzing the development of special autonomy in 7 development sectors. The economy in Gayo Lues Regency whose potential for development is faster than other regions in Aceh Province is the manufacturing industry sector; electricity, gas and clean water sector; building sector; trade, hotel and restaurant sector; transportation and communication sector; financial, leasing and company services sector; and the services sector. These sectors are expected to be a sector that excels in future competition. From the LQ test it can be seen that the non-base sectors (LQ test results), show slowing growth. Some economic sectors which in the period before regional special autonomy (2010-2017) are expected to be a sector that excels in competition in the future, apparently experiencing slowing growth in the period after the implementation of regional special autonomy (2010-2017). The sector includes mining and quarrying. Whereas the sector experiencing rapid development is the building sector; trade, hotel and restaurant sector; transportation and communication sector; as well as the financial, rental and corporate services sectors.*

*Keywords: Economic Potential, Special Autonomy*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	22
1.3 Batasan Masalah.....	22
1.4 Rumusan Masalah .....	23
1.5 Tujuan Dan Mamfaat Penelitian .....	23
1. Tujuan Penelitian .....	23
2. Mamfaat Penelitian .....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
2.1 Uraian Pustaka .....	25
2.1.1 Pembangunan Ekonomi .....	25
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	31
2.1.3 Pembangunan Ekonomi Daerah .....	35
2.1.4 produk Domestik Regional Beruto (Pdrb) .....	38
2.1.5 Strategi Pembanguna Ekonomi Daerah .....	40



2.1.6 Tipologi Ekonomi Regional.....	40
2.2 Kebijakan Pemerintah .....	41
2.2.1 Pengertian Otonomi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus .....	41
2.2.2 Mamfaat Dana Otonomi Khusus.....	42
2.2.3 Daerah Yang Di Berikan Otonomi Khusus.....	42
2.2.4 Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus.....	43
2.2.5landassan Hukum Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus .....	43
2.2.6 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Realisasi Anggaran .....	45
2.2.7 Peraturan Gubernur Aceh.....	46
2.3 Penelitian Terdahulu .....	48
2.4 Tahapan Penelitian .....	50
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	52
3.2 Definis Operasional Konsep/Variabel.....	52
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	53
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	54
A. Jenis Data .....	54
B. Sumber Data .....	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Analisis Data.....	55

<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Otonomi Khusus Dan Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues .....	56
4.1.1 Sejarah Otonomi Khusus .....	56
4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues .....	60
A. Gambaran Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues .....	60
B. Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues .....	66
C. Kependudukan.....	67
D. Pendidikan.....	68
E. Ekonomi.....	70
1. Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb).....	70
F. Kesehatan.....	71
1. Prasarana .....	71
2. Tenaga Medis .....	72
G. Indek Pembangunan Manusia .....	73
1. Komponen Indek Pembangunan Manusia .....	74
4.2 Analisis Dan Pembahasan .....	75
A. Menganalisis Sector Ekonomi Pada Wilayah Kabupaten Gayo Lues Menggunakan Data.....	75
2.2.2 Perkembangan Pada 7 Sector Pembangunan Di Kabupaten Gayo Lues Sebelum Dan Sesudah Dana Otonomi Khusus.....	75
1. Infrastruktur.....	77

2.Prekonomian .....	78
3.Kemiskinan .....	79
4.Pendidikan .....	80
5.Sosial .....	81
6.Kesehatan .....	81
7. Keistimewaan Kabupaten Gayo Lues .....	82
4.3 Analisis Sector Ekonomi Basic Di Kabupaten Gayo Lues .....	84
<b>BAB V : KESIMPULA DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran.....	93
Daftar Pustaka .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 11 Kondisis Jalan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Tahun 2005-2010.....	15
Tabel 1.2 kondisi jembatan nasional dan provinsi tahun 2015 .....	18
Tabel 1.3 Data Dan Persentase Dan Pringkat 10 Kabupaten/Kota Termiskin Di Aceh 2017 .....	20
Tabel 2.1 Tipologi Daerah .....	41
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	49
Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	52
Tabel III.1 WAKTU PENELITIAN .....	54
Tabel 4.1 Perbatasan Kabupaten Gayo Lues.....	64
Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 .....	66
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan penduduk Per Tahun 2014-2017 .....	67
Tabel 4.4 Jumlah Sekolah, Murid, Guru Dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gayo Lues .....	68
Tabel 4.5 Jumlah Sekolah, Murid, Guru Dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gayo Lues .....	69
Tabel 4.6 Jumlah Sekolah, Murid, Guru Dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan Di Kabupaten	



Gayo Lues.....	69
Tabel 4.7 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Umur 5 Tahunke Atas .....	70
Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010	
Menurut Penggunaan (Persen) Dikabupaten Gayo Lues	
2011-2016.....	70
Tabel 4.9 Prasarana Kesehatan Kabupaten Gayo Lues Pada Tahun 2016 .....	71
Tabel 4.10 Tenaga Medis Di Kabupaten Gayo Lues Pada Tahun 2016 .....	73
Tabel 4.11 Ipm Kabupaten Gayo Lues Dan Komponen Nya	
Tahun 2010 - 2017.....	75
Tabel 1 Infrastruktur Kondisi Panjang Jalan Dri Tahun 2007-2011 .....	77
Tabel 4 Angka Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Gayo Lues Dari	
Tahun 2007-2012 .....	80
Tabel 4.2 Pdrb Kabupaten Gayo Lues Atas Dasar Harga Konstan	
Tahun 2010-2017 (Jutaan Rupiah).....	84
Tabel 4.3 Hasil Analisi LQ Kabupaten Gayo Lues Pada Periode	
Setelah Pelaksanaan Otonomi Khusus .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proyeksi Penerimaan Dana Otonomi Khusus .....	11
Gambar 1.2 Alokasi Dana Otonomi Khususaceh Tahun 2008-2015 .....	13
Gambar 4.1 Logo Kabupaten Gayo Lues.....	62
Gambar 4.2 Kabupaten Gayo Lues Dalam Peta Provinsi Aceh.....	64
Gambar 4.3 Peta Perbatasa Dan Infrastruktur Kabupaten Gayo Lues .....	65
Gambar 2 Penerimaan PDRB Kabupaten Gayo Lues Dari Tahun 2006-2011 .....	78
Gambar 3 Presentase Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Gayo Lues .....	79
Gambar 6 Tentang Kondisi Tenaga Medis Di Kaupaten Gayo Lues Dari Tahun 2006-2011 .....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah Negara yang di Pimpin oleh Kedaulatan sistem Demokrasi dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang di mana kepentingan Rakyat di atur oleh Pemerintah Indonesia baik itu hukum, ekonomi dan lain nya.

Dalam mengurus kepentingan Masyarakat Indonesia tentang Prekonomian Masyarakat Indonesia banyak terjadi ketimpangan konomi antar wilayah yang menyebabkan kecemburuan dari berbagai wilayah karna ketidakadilan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ,apalagi terhadap wilayah timur dan barat indonesia yang merasa seperti di anak tirikan atau tidak di perdulikan oleh pemerintah pusat terhdap daerah timur dan barat baik itu segi ekonomi, sosial, hukum, ketidakmerataan pembangunan karena wilayah timur dan barat merasa pemerintah hanya memperdulikan daerah pembangunan di pusat pemerintahan sedangkan di wilayah perbatasan di biarkan begitu saja tidak ada campur tangan pemerintah terhadap kemajuan dan perkembangan dari wilayah perbatasan itu sendiri, dalam hal ini banyak menemukan perdebatan dari daerah yang merasa tidak di perdulikan oleh pemerintah, sedangkan kekayaan bumi air di kuasa pemerintah dan untung nya untuk pemerintah pusat tidak untuk daerah bersangkutan sedangkan hasil dari kekayaan dari wilayah timur dan barat banyak di ambil oleh pemerintah pusat dan menjadi penyumbang kekayaan bagi indoneisa

dalam jumlah yang di bilang sangat besar dan tidak sebanding dengan pembangunan yang di dapatkan dari pemerintaah pusat.

Pada kejadian ini menyebabkan kan banyak terjadi peberontakan yang di lakukan di Wilyah Timur dan Barat indonesia yang bertujuan untuk meisahkan diri dari kesatuan indonesia karna ketidakadilan pemerintah indonesia maka dari itu pemerintah mebuat kebijakan “DESENTRALISASI” Ekonomi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Dimana pemerintah mebuat kebijakan Desentralisasi Ekonomi bertujuan agar tidak ada lagi komplik antar wilayah yang karna ketidakmerataan pebangunan yang di lakukan oleh Pemerintah pusat agar bertujuan membangun Wilayah secara merata dan Daerah juga bisa melakukan pebaikan Daerah nya sendiri karna permasalahan yang terjadi di Daerah hanya Daerah itu sendiri yang lebih mengetahuinya.

Namun dengan adanya kebijakan Desentralisasi Ekonomi masih saja tidak bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di Wilayah Timur dan Barat malah terjadi gejolak kekacauan yang sangat lebih besar lagi yang terjadi di Wilayah Timur dan Barat indonesia karna merasa belum cukup perhatian Pemerintah yang di dapat kan. Seperti di daerah Aceh Dan Papua yang ingin memisahkan diri dari indonesia

Di Aceh mebuat gerakan yang di namakan dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang ingin berpisah dari indonesia atau GAM adalah sebuah organisasi



separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Pada 4 Desember 1976 inisiator Gerakan Aceh Merdeka Hasan di Tiro dan beberapa pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah RI yang dilangsungkan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidie. Diawal masa berdirinya GAM nama resmi yang digunakan adalah AM, Aceh Merdeka. Oleh pemerintah RI pada periode 1980-1990 nama gerakan tersebut dikatakan dengan GPK-AM. Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut mendapat sambutan keras dari pemerintah pusat RI yang akhirnya menggelar sebuah operasi militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan DOM (Daerah Operasi Militer) pada paruh akhir 80-an sampai dengan penghujung 90-an, operasi tersebut telah membuat para aktivis AM terpaksa melanjutkan perjuangannya dari daerah pengasingan. Disaat rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilangsungkan di Indonesia, seiring dengan itu pula Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya.

Begitu pula di daerah Papua Dan Papua Barat membuat gerakan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia yang dilakukan mdengan embuat gerakan Sparatis yang ber nama OPM (Organisasi Papua Merdeka) Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Maka dari itu pemerintah melakukan pendekatan damai dengan cara memberikan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus.

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah 'tertentu' dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah 'tertentu' yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus berkejolak.

sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat sebelum Perubahan menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari system penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah. Dari sisi sosial ekonomi, sentralisasi yang telah dipraktikkan selama masa orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, yang berujung kepada ancaman terhadap integrasi nasional. Desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan hubungan pusat daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis. Khusus untuk Aceh dan Papua, pemberian otonomi khusus juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik integrasi yang telah berkepanjangan.

Guna mengurangi kesenjangan pembangunan di daerah, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendidikan, pemerintah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua, Provinsi Aceh dan Provinsi Papua

Barat serta dana keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang besarnya berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan APBN.

Penyaluran dana otsus dilakukan agar daerah dapat mengatur diri sendiri. Pemberian kewenangan khusus diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat guna mewujudkan keadilan dalam konsep pengelolaan hasil daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Pembagian alokasi dana antara satu provinsi dan yang lain berbeda-beda. Untuk Papua, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jumlahnya 70 persen dialokasikan untuk Provinsi Papua dan 30 persen Provinsi Papua Barat.

“Kewenangan pengalokasian sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Tujuannya memperkuat asas desentralisasi yang diatur dalam peraturan daerah khusus (perdasus),” katanya. Untuk Provinsi Papua, sekitar 80 persen dialokasikan ke kabupaten/kota dan sisanya dikembalikan ke provinsi. Sementara Papua Barat sekitar 90 persen dialokasikan untuk kabupaten/kota dan sisanya dikembalikan ke provinsi.

Pemanfaatan dana otsus Provinsi Papua serta Papua Barat diprioritaskan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat alokasi dana otsus senilai Rp 8 triliun. Kedua provinsi ini juga mendapat dana tambahan infrastruktur senilai Rp 4 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Dana otsus juga dialokasikan untuk Provinsi Aceh dengan besaran setara dua persen dari DAU nasional. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



Dalam APBN 2018, Provinsi Aceh mendapat alokasi dana otsus senilai Rp 8 triliun. Dana otsus ini untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, juga kesehatan.

Untuk Provinsi DI Yogyakarta, dalam APBN 2018, mendapat alokasi dana keistimewaan senilai Rp 1 triliun. Dana keistimewaan ini untuk pertanahan, tata ruang, kelembagaan, juga kebudayaan. “Serta tata cara pengangkatan gubernur yang selama ini selalu dijabat sultan.

Evaluasi penyaluran dana otsus dan dana keistimewaan dilakukan secara rutin setiap tahun di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Mekanisme kontrolnya pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi alokasi termin pertama yang akan diperiksa Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Kemudian Ditjen Keuangan Daerah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk mencairkan atau tidak mencairkan termin berikutnya.

Pemerintah saat ini tengah merumuskan kemungkinan adanya pagu tambahan dana otsus. Ada beberapa wacana yang sudah didiskusikan dalam focus group discussion. Kalau melihat kondisi pada awal 2018, masih membutuhkan dana tambahan.

Otonomi khusus berdasarkan UUDNRI 1945 Pasca Perubahan memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan daerah khusus berdasarkan UUDNRI 1945 sebelum perubahan. Otonomi berarti daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga sendiri atau urusan daerah sendiri diluar urusan tertentu yang ditentukan sebagai urusan pemerintah

pusat. Otonomi khusus berarti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah ditentukan berbeda dengan daerah pada umumnya. Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah. Otonomi khusus berbeda dengan daerah khusus karena di dalam otonomi khusus perbedaan dengan daerah lain bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi perbedaan ruang lingkup hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah, serta pola dan proporsi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah khusus.

Fungsi lain dari otonomi khusus adalah untuk menjaga keutuhan negara, hal ini dikarenakan setiap daerah mempunyai kebutuhan dan kategori sejahtera yang berbeda-beda. Sehingga dengan ditetapkannya satu aturan dari pemerintah pusat, belum tentu dapat menjawab tuntutan dari semua masyarakat di daerah-daerah yang berbeda. Bila dilihat dari sisi historis pemberian otonomi khusus (Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua) merupakan alat peredam daerah tersebut untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Kedua daerah tersebut ingin melepaskan diri dari Indonesia dikarenakan kebijakan pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Di sini otonomi khusus diberikan untuk kedua daerah tersebut agar dapat menjalankan tuntutan kebutuhan masyarakat daerahnya tanpa harus melepaskan diri dari Indonesia.

Perwujudan desentralisasi asimetris (*asymetrical decentralization*) dapat dilihat dengan adanya beberapa daerah di Indonesia yang memiliki pengaturan terkait pemerintahan daerah yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Setidaknya terdapat 4 (empat) daerah di tingkat provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu daerah otonomi khusus yang

dimaksud adalah Provinsi Aceh. Pada tanggal 15 Agustus 2005 diselenggarakan penjanjian Helsinki yang kemudian melahirkan MoU Helsinki yang merupakan suatu nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berangkat dari nota kesepahaman tersebut, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2006 dibentuklah Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut dapat dikatakan babak baru dalam pengaturan kekhususan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Undang-undang tersebut terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal yang mengatur berbagai aspek dalam Pemerintahan Aceh. Mulai dari pembagian daerah di Aceh, proses pemilihan kepala daerah, pengakuan adanya partai lokal Aceh, adanya Qonun Aceh sebagai peraturan daerah Pemerintahan Aceh, aspek keuangan dalam Pemerintahan Aceh dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh.

Dapat dikatakan bahwasanya dalam konteks resolusi konflik yang ada di Aceh, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berhasil mengatasinya dengan berbagai kekhususan yang diberikan bagi Pemerintahan Aceh. Persoalan justru muncul terhadap beberapa ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut, khususnya ketentuan yang terkait dengan sumber pendapatan Pemerintahan Aceh dalam mengelola daerahnya. Pengaturan sumber pendapatan bagi Pemerintahan Aceh terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 179

1. Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah;

- 2) Dana Perimbangan;
- 3) Dana Otonomi Khusus; dan
- 4) lain-lain pendapatan yang sah.

Konsekuensi terhadap ketentuan tersebut pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana otonomi khusus dalam APBN setiap tahunnya yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh sebagai salah satu sumber pendapatan daerahnya. Pengalokasian dana otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh memberikan kesenjangan terhadap sumber pendapatan daerah-daerah lain yang notabene bukan merupakan daerah otonomi khusus. Ketentuan dalam pasal tersebut yang mengharuskan pemberian alokasi sejumlah dana yang digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Aceh menimbulkan kecemburuan bagi daerah-daerah lain yang terkadang justru lebih membutuhkan dana tersebut.

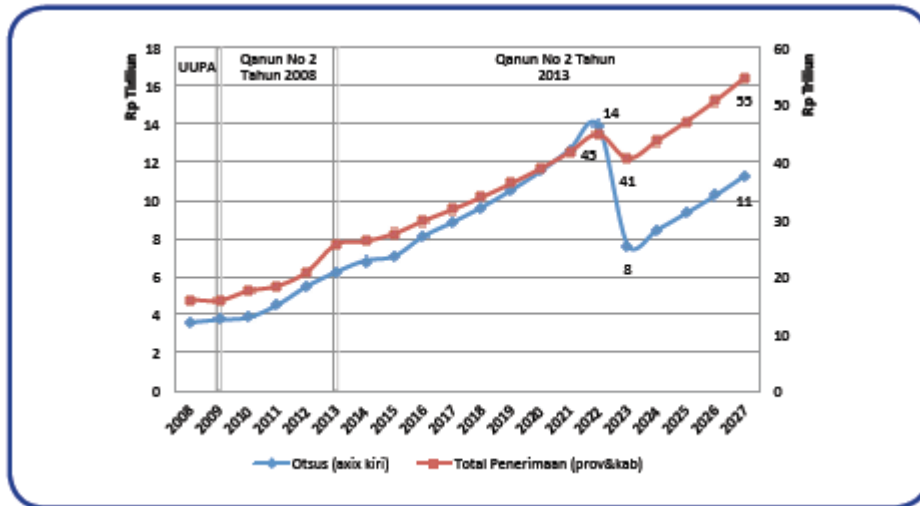
Besaran dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Aceh pada tahun 2015, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp. 7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Aceh memiliki kesempatan yang besar dalam mengejar ketertinggalan pembangunan melalui Dana Otsus. Sejak tahun 2008 hingga 2015, Aceh telah menerima Dana Otsus sebesar Rp 41,49 triliun dan telah menjadi sumber penerimaan utama bagi pembangunan Aceh, dengan rata-rata peningkatan penerimaan sebesar 11 persen pertahunnya, Gambar 1.1. Selama 20 tahun jangka



waktu berlakunya Dana Otsus, Aceh diperkirakan akan menerima sebesar Rp 163 triliun (gambar1.1). Hal ini memberikan kesempatan emas bagi Aceh untuk memacu pembangunan di masa mendatang.

**Gambar 1.1**  
**Proyeksi Penerimaan Dana Otsus**



Sumber : Diolah dari data Pemerintah Aceh, PPKD

Dana tersebut menjadi tambahan dana transfer dari pusat bagi pemerintah daerah Aceh selain dana transfer berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana otonomi khusus yang diterima Aceh tersebut juga telah ditentukan penggunaannya. Setidaknya kurun waktu 20 tahun kedepan Pemerintah Aceh setiap tahunnya akan mendapatkan dana otonomi khusus yang dialokasikan dari APBN. Daerah-daerah lain yang bukan merupakan daerah otonomi khusus tidak akan mendapatkan dana tambahan tersebut. Padahal dana otonomi khusus tersebut merupakan alokasi dana yang diambil dari Dana Alokasi Umum secara nasional.

Dalam hal ini yang lebih menjadi persoalan lagi terjadi terhadap pemerataan kesejahteraan, melihat dasar ketentuan dalam pemberian dana otonomi khusus tersebut bagi Pemerintah Aceh akan selalu diberikan dan tidak

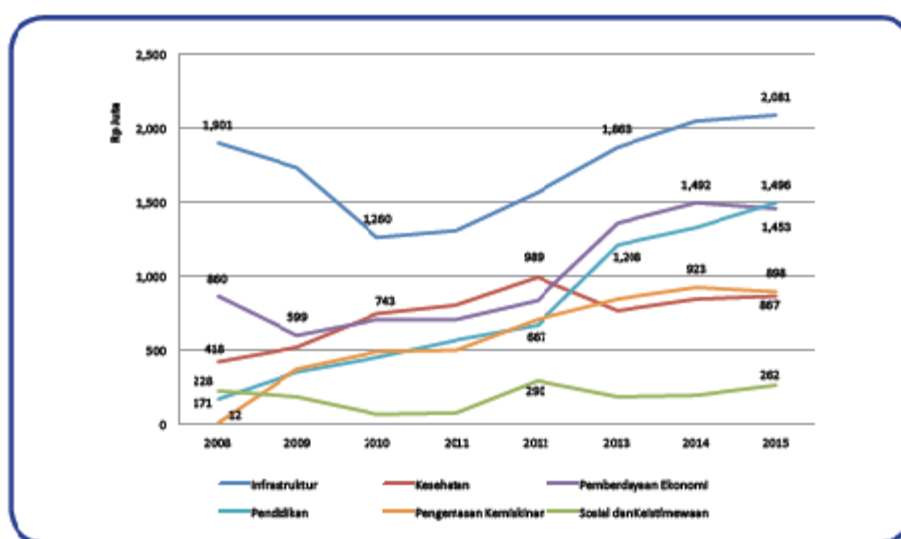
tergantung pada tingkat penyerapan anggaran di tahun sebelumnya ataupun jenis program pemerintah Aceh yang akan dilakukan. Pemerintah Aceh tetap akan mendapatkan dana otonomi khusus tersebut walaupun pada tahun sebelumnya penyerapannya sangatlah rendah. Selain itu juga, ketika pemerintah Aceh sudah tidak terlalu membutuhkan dana tersebut, pemerintah pusat dengan dasar ketentuan tersebut, melalui APBN akan tetap menganggarkan dana otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh. Daerah-daerah lain masih banyak yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong kecil dan lebih membutuhkan dana tambahan bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya. Ketentuan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seakan menutup mata terhadap persoalan tersebut.

Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan mempunyai daya dorong yang kuat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Otsus sebagaimana telah dimandatkan dalam undang-undang dan qanun untuk membiayai 7 sektor pembangunan, yaitu; infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Pembiayaan pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini diharapkan dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi Aceh untuk memacu pembangunan.

Dana Otsus dialokasikan untuk membiayai enam bidang utama dan bidang keistimewaan Aceh. Beberapa bidang utama seperti infrastruktur dan pendidikan mendapatkan alokasi yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor infrastruktur mendapat alokasi terbesar sejak tahun 2008, terhitung sebesar

Rp 13,7 T hingga tahun 2015. Alokasi infrastruktur tercatat rata-rata sebesar 36 persen setiap tahunnya, yang mencerminkan prioritas pembangunan Aceh disamping bidang pendidikan. Kedua bidang ini memiliki porsi sebesar 50 persen dari keseluruhan alokasi otsus pada tahun 2015. Sedangkan bidang ekonomi dan pengentasan ekonomi tercatat sebesar 34 persen dari keseluruhan alokasi.

**Gambar 1.2**  
**Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2015**



Sumber : Diolah dari data Pemerintah Aceh, PPKD

Dana Otonomi Khusus merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberi kewenangan penuh untuk Pemerintah Provinsi dalam mengelola Dana Otsus dan dianggap sebagai sebagai penerimaan Pemerintah Aceh untuk membiayai program pembangunan. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten/kota. Meskipun Pemerintah Pusat menyalurkan dana otonomi khusus melalui

Pemerintah Provinsi, namun dana otonomi khusus juga merupakan penerimaan Kabupaten/kota.

Pemanfaatan dana Otsus yang dimulai sejak 2008 lalu, ternyata sebagian belum sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan atau rencana induk. Empat kabupaten di dataran tinggi Gayo, mulai dari Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan tuan rumah Bener Meriah.

Pemerintah Aceh selama ini melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan informasi dan data pemanfaatan dana Otsus, serta pemikiran dari masing-masing kabupaten.

Salah satu faktor penting mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga akan mengintegrasikan industri yang ada di Aceh sehingga pertumbuhannya juga akan semakin meningkat.

Sistem jaringan jalan di Aceh belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan orang yang memadai. Hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat jaringan jalan yang belum dapat menghubungkan antar kawasan dengan baik. Secara keseluruhan panjang jalan di Aceh yaitu 17.198,28 km yang terdiri dari jalan nasional (1.810,36 km) dan jalan provinsi (1.833,33 km). Masing-masing jalan tersebut dikategorikan kedalam kondisi baik, sedang dan rusak berat yang secara rinci disajikan pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2006 - 2010**

No	Tahun		Panjang Jalan (km)	Kondisi Jalan (km)			
				Baik	Sedang	Rusak	Belum Tembus
1	2007	Nasional	1.789,78	1.163,26	306,01	313,51	Na
		Provinsi	1.701,82	442,47	621,08	618,27	Na
2	2008*	Nasional	1.789,78	1.163,26	306,01	313,51	Na
		Provinsi	1.701,82	442,47	621,08	618,27	Na
3	2009*	Nasional	1.789,78	1.163,26	306,01	313,51	Na
		Provinsi	1.701,82	442,47	621,08	618,27	Na
4	2010	Nasional	1.810,36	1.120,42	592,81	90,13	81,98
		Provinsi	1.833,33	820,08	547,63	375,62	70,00
5	2011	Nasional	1.810,36	1.120,42	592,81	90,13	81,98
		Provinsi	1.833,33	820,08	547,63	375,62	70,00

Sumber: BPS, 2012

\*) 2008 dan 2009 informasi data tidak ada

Bila ditinjau dari luas wilayah Aceh dan bentang alam mulai dari lintas pantai Timur – Utara hingga ke lintas Barat – Selatan dan menembus lintas Tengah, maka proporsi dan panjang jaringan jalan belum mencukupi aksesibilitas pergerakan orang dan barang. Proporsi jalan Nasional adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional, maka keberadaan dari segi panjang sudah mencukupi, hanya saja dari segi kondisi perlu peningkatan sesuai kebutuhan lalu lintas dan diperlukan penuntasan beberapa ruas jalan yang belum tembus (jalan Jantho – Keumala ,jalan Geumpang – Pameu, Jalan Sp.Lawe Deski – Muara Situlen – Gelombang, dan Jalan Trumon – Buluhseuma – Kuala Baru - Singkil) untuk saat ini dan prediksi ke depan. Demikian juga dengan kebutuhan jalan kabupaten/kota yang merupakan kewenangan dari masing-masing kabupaten/kota, sehingga setiap kabupaten/kota dapat memenuhi kebutuhan pelayanan minimal dari prediksi

pergerakan yang terjadi antar kecamatan dan kecamatan/desa menuju ke kota/kabupaten.

Berbeda halnya dengan jalan Provinsi yang secara administrasi kewenangan di bawah pemerintah Aceh. Keberadaan lintas Tengah dan jaringan penghubung (jalan pengumpan/feeder road) antara pantai Barat dan pantai Timur melalui wilayah Tengah adalah merupakan keharusan agar disparitas dan kesenjangan dalam aksesibilitas di seluruh wilayah Aceh dapat teratasi.

Langkah strategis yang dilakukan didalam penyelesaian pembangunan jalan lintas tengah yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan pembiayaan bersumber dari APBN yang disesuaikan dengan perencanaan jalan di dalam RTRW Aceh, dengan prioritas sebagai berikut:

a. Pembangunan jalan lintas tengah jalan nasional dengan ruas:

- 1) Jalan Sp. Seulimum – Jantho (9,58 Km)
- 2) Jalan Jantho – Keumala (34,98 Km) \*)
- 3) Jalan Keumala – Geumpang (66,99 Km)
- 4) Jalan Geumpang – Pameu (48,13 Km) \*)
- 5) Jalan Pameu – Genting Gerbang (53,69 Km)
- 6) Jalan Genting Gerbang – Sp. Uning (18,86 Km)
- 7) Jalan Sp. Uning – Uwaq (68,08 Km)
- 8) Jalan Uwaq - Bts. Gayo Lues (20,55 Km)
- 9) Jalan Bts. Gayo Lues – Blangkejeren (46 Km)
- 10) Jalan Blangkejeren – batas Aceh Tenggara (63,38)
- 11) Jalan batas Gayo Lues – Kutacane (40,20 Km)
- 12) Jalan Kutacane - Batas Sumatera Utara (33,96 Km)

b. Peningkatan jalan penghubung antar kabupaten/kota dengan ruas:

- 1) Jalan Kreung Keukeuh – batas Bener Meriah (52,60 Km)
- 2) Jalan Batas Aceh Utara – Bandara Rambele (29,73 Km)
- 3) Jalan Rambele – Batas Aceh Tengah (14,97 Km)

4) Batas Bener Meriah – Sp. Kebayakan (5,86 Km)

5) Jalan Sp. Kebayakan - Sp.Kraft (52 Km)

Agar aksesibilitas antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh dan menuju ke Ibukota Provinsi di Banda Aceh dari semua wilayah terakomodir dengan pengurangan biaya operasi kendaraan dan penghematan waktu perjalanan, maka kondisi dan keberadaan jalan provinsi tersebut di atas perlu ditingkatkan.

Selanjutnya total penanganan jalan provinsi lainnya yang harus dibangun/ditingkatkan adalah sepanjang 707,15 km, sedangkan yang dipelihara sepanjang 1.576 km. Prioritas penanganan jalan provinsi adalah sebagai berikut :

1. Peureulak - Lokop - Pinding - Blangkejeren (138,90 km) \*)
2. Babah Rot - Trangon - Blangkejeren (76,50 km)
3. Jantho - Lamno (45,50 km) \*)
4. Jeuram - Lhok Seumot – Celala - Genting Gerbang (48 km)
5. Sp. Kr. Geukuh - Bts. Bener Meriah (18,55 km)
6. Sp. Teritit - Pondok Baru - Samar Kilang – Peunaron (91,50 km)
7. Sp. Lw. Deski - Muara Situlen - Gelombang (71,55 km) \*)
8. Trumon - Buluhseuma - Kuala Baru - Singkil (60 km)
9. Bener Meriah – Batas Aceh Utara (26,95 km)
10. Serafon – Lewak – Sibigo (84,70 km)
11. Ie Mirah – Lama Muda (45 km)

Panjang jembatan provinsi adalah 17.826,05 meter dan jembatan nasional 14.897,90 meter dengan total panjang keseluruhan adalah 32.723.95 meter. Kondisi baik jembatan adalah sepanjang 16.544,40 meter, sisanya sepanjang 16.179,55 meter terbagi atas kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kondisi ini diperlukan penanganan pembangunan maupun pemeliharaan jembatan, sehingga dicapai kondisi mantap jembatan. Selain itu, ada beberapa jembatan yang merupakan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh provinsi baik yang

mengalami rusak berat/putus maupun terbengkalai perlu ditangani sampai tuntas (Tabel.1.2).

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Jembatan Nasional dan Jembatan Provinsi**  
**Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jembatan (Km)			
		Jumlah (buah)	Panjang (m)	Baik	
				Buah	Panjang (m)
1	Aceh Besar	147	3.520,44	63,00	1.428,00
2	Banda Aceh	9	516,100	-	-
3	Sabang	27	159,10	9,00	52,10
4	Pidie	234	4.101,92	85,00	1.246,70
5	Pidie Jaya	-	-	-	-
6	Aceh Jaya	311	8.542,56	283,00	7.376,80
7	Aceh Timur	118	2.663,78	72,00	1.726,50
8	Aceh Utara	150	2.948,20	129,00	2.598,40
9	Aceh Tamiang	-	-	-	-
10	Langsa	-	-	-	-
11	Lhokseumawe	-	-	-	-
12	Aceh Tengah	149	2.091,29	57,00	780,30
13	Bener Meriah	10	185,15	-	-
14	Bireuen	22	388,09	-	-
15	Aceh Selatan	29	290,92	1,00	30,30
16	Aceh Barat	142	1.585,37	5,00	46,00
17	Simeulue	190	2.314,27	-	-
18	Aceh Singkil	36	635,24	-	-
19	Aceh Barat Daya	10	146,00	-	-
20	Subulussalam	-	-	-	-
21	Nagan Raya	46	530,47	-	-
22	Aceh Tenggara	115	1.736,60	88,00	1.259,30
23	Gayo Lues	28	368,45	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.773</b>	<b>32.723,95</b>	<b>792,00</b>	<b>16.544,40</b>

Sumber : Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, 2015

Beberapa jembatan yang perlu diprioritaskan pembangunannya adalah jembatan provinsi dan pembangunan jembatan strategis kabupaten 5.000 meter. Selanjutnya pembangunan beberapa jembatan baru dan jembatan lanjutan yang terbengkalai yaitu: jembatan Lam Sie (200 m), jembatan Lampanah Tunong (310



m), jembatan Lamreng - limpok (310 m), jembatan Panca (120 m), jembatan Desa Lueng Sa - Matang Guru (120 m), jembatan Pulau Banyak (100 m), jembatan Ruas Jalan Kp. Aie (160 m), jembatan Berawang Kunyit (50 m), jembatan Sikiren (60 m), jembatan Ruas Jalan Trumon - Bulu Seuma - Kuala Baro (300 m).

Berdasarkan uraian sebelumnya upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan orang antara lain: 1) penyediaan perencanaan sistem jaringan jalan dan jembatan yang terintegrasi; 2) peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan dan 3) pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar lintas timur, barat dan tengah yang belum tembus.

Disamping itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan pemerintah Aceh juga sudah merencanakan pembangunan jalan highway yang telah direncanakan didalam RTRW Aceh, adapun ruas jalan lintas tengah tersebut: krueng raya-laweung-Tangse-Gempang-Pameu-Linge Isak-Blangkejeren-Kutacane-Lawe Pakam-Subulussalam-Singkil.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Gayo Lues dikarenakan Kabupaten tingkat kemiskinannya paling tinggi. Hal ini dapat dilihat pada data IDEAS: Data persentase dan peringkat 10 Kabupaten/kota termiskin di Aceh.

Tabel 1.3

Data Persentase Dan Pringkat 10 Kabupaten/Kota Termiskin Di Aceh

IDeAS : Data Persentase dan Peringkat 10 Kabupaten/Kota Termiskin di Aceh				
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin 2016 (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016	Perbandingan dengan Tahun 2015
1	Gayo Lues	19,48 ribu	21,86 %	- 0,09
2	Aceh Singkil	25,09 ribu	21,60 %	- 0,12
3	Bener Meriah	29,82 ribu	21,43 %	- 0,12
4	Pidie	90,16 ribu	21,25 %	+ 0,07
5	Pidie Jaya	31,94 ribu	21,18 %	- 0,22
6	Aceh Barat	40,11 ribu	20,38 %	- 1,08
7	Simeulue	17,93 ribu	19,93 %	- 0,50
8	Subulussalam	14,99 ribu	19,57 %	- 0,82
9	Aceh Utara	115,05 ribu	19,46 %	+ 0,26
10	Nagan Raya	30,31 ribu	19,25 %	- 0,88

Ket :

- Data kemiskinan diolah oleh IDeAS dari publikasi data BPS RI, 3 Agustus 2017.
- (+) Merah = Kemiskinan Meningkat, (-) Hitam = Kemiskinan Menurun.

Dari data statistik kemiskinan untuk kab/kota di Aceh, masih ada lima kabupaten dengan persentase tingkat kemiskinan sangat tinggi, dan masih di atas 21 persen, yakni Gayo Lues, Aceh Singkil, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya.

Hasil kajian Institute for Development of Acehese Society (IDeAS) dari data terbitan BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Gayo Lues sampai tahun 2016 masih yang tertinggi di Aceh, sama seperti tahun 2015 lalu. Dari 23 kab/kota di Aceh, Gayo Lues masih menempati urutan pertama kabupaten termiskin di Aceh yaitu 21,86 persen, selanjutnya Aceh Singkil (21,60), Bener Meriah (21,43), Pidie (21,25) dan Pidie Jaya (21,18).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues (Galus) telah menerima dana otonomi khusus (Otsus) melalui Pemerintah Aceh sebanyak Rp 200 miliar lebih. Dana itu lebih banyak digunakan untuk memperbaiki jalan provinsi yang rusak, khususnya Blangkejeren-Terangun menuju Babahrot, Abdya dan Blangkejeren-Pining yang tembus ke Lokop, Aceh Timur.

Namun dana Otsus dari tahun 2008 sampai 2018 sebesar Rp 200 miliar lebih digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan ruas jalan provinsi yang terus rusak, seperti kerap tertimbun longsor atau amblas dan lainnya. Perawatan jalan tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab provinsi. Pemkab Galus harus mengambil inisiatif untuk segera memperbaiki jalan yang rusak agar transportasi kembali lancar. Seperti diketahui, jalur provinsi dari Blangkejeren ke Babahrot, Abdya kerap tertimbun material longsor atau juga amblas digerus guyuran air dari perbukitan, terutama pada saat musim hujan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada bulan Maret 2018 merilis jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 10 ribu jiwa, dari 829 ribu jiwa pada bulan September 2017 lalu meningkat menjadi 839 ribu jiwa. Penyebab angka kemiskinan di Aceh tidak mau turun adalah karena program pembangunan tidak tepat sasaran. Penyebab lain tidak turunnya angka kemiskinan di Aceh adalah karena banyak orangtua yang cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke SMA, dan tidak memilih SMK yang merupakan lembaga pendidikan vokasional. Usai tamat SMA mereka tidak memiliki skill dan tentu akan menganggur.

Hal ini sangat bertolak belakang dari Undang-undang Pemerintahan Aceh, dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2), merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dengan adanya dana otonomi khusus yang merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota juga berdasarkan

Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang memberi kewenangan penuh untuk Pemerintah Provinsi dalam mengelola Dana Otsus dan dianggap sebagai penerimaan Pemerintah Aceh untuk membiayai program pembangunan, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Analisa Potensi Ekonomi Kabupaten Gayo Lues Pasca Kebijakan Otonomi Khusus**”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Tingginya tingkat kemiskinan dan lambatnya pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Gayo Lues.
2. Desain pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Gayo Lues kurang memperhatikan potensi ekonomi yang memiliki keunggulan sehingga daya saingnya masih rendah.
3. Ketidakmerataan pembangunan akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami penurunan.
4. Rendahnya pengembangan dan peningkatan kualitas sarana, prasarana infrastruktur yang menyebabkan menurunnya minat investor dalam menanamkan modalnya.
5. Rendahnya mutu pendidikan dan rendahnya pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Gayo Lues.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada hal yang menjadi batasan masalah didalam penelitian ini yaitu penulis hanya memfokuskan penelitian ini

tentang Analisa Potensi ekonomi Kabupaten Gayo Lues Pasca Kebijakan Ekonomi Khusus.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang mempunyai potensi daya saing kompetitif dan komparatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gayo Lues pasca kebijakan otonomi khusus.
2. Sektor-sektor basis ekonomi apa saja yang dapat dikembangkan untuk penguatan daya saing bagi Kabupaten Gayo Lues pasca kebijakan otonomi khusus.

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Melakukan analisis perkembangan sectorekonomi di Kabupaten Gayo Lues pasca kebijakan Otonomi khusus.
- b. Menganalisis penggunaan Otonomi Khusus pada 7 sector pembangunan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Akademis

Dalam penulisan ilmiah ini dapat diharapkan memberi pengetahuan bagi mahasiswa dalam memahami potensi ekonomi di kabupaten Gayo Lues pasca kebijakan otonomi khusus dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan tambahan bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Non Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya mengenai potensi ekonomi di Kabupaten Gayo Lues pasca kebijakan otonomi khusus dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperhatikan potensi ekonomi di Gayo Lues.

c. Bagi Penulis

Ialah mengetahui perkembangan prekonomian di daerah Kabupaten Gayo Lues sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi khusus

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pembangunan Ekonomi**

Berikut adalah beberapa definisi pembangunan ekonomi menurut beberapa ahli. Secara tradisional pembangunan memiliki arti yaitu Produk Domestik Bruto suatu negara mengalami peningkatan yang terus menerus, untuk daerah makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten atau kota. Sementara itu paradigma pembangunan modern berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), penurunan tingkat pengangguran, penurunan distribusi pendapatan yang tidak merata dan pengentasan garis kemiskinan. Menurut para ekonom ini paradigmbangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2004). Menurut Irawan dan Suparmoko (2008: 178) pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan taraf hidup bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita, sehingga tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional saja tapi juga untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara itu menurut Suryana (2010: 81) pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk dalam suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, dimana pembangunan ekonomi ini sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus dan berlangsung dalam

jangka panjang. Sedangkan menurut Arsyad (2002: 116) pembangunan ekonomi pada umumnya adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Menurut Suryana (2010: 89), dalam memahami ekonomi pembangunan kita harus dapat membedakan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa melihat kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa melihat apakah adanya perubahan dalam struktur ekonominya. Sementara itu pembangunan ekonomi mempunyai arti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita atau GDP masyarakat dimana kenaikannya dibarengi oleh perombakan dan modernisasi dan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*).

Pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pertumbuhan, dalam artian bahwa dengan adanya pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan, dimana pertumbuhan dalam hal ini dapat berupa pengembangan atau perluasan atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat, dan pertumbuhan akan terjadi akibat adanya pembangunan (Basuki dan Prawoto, 2014). Hal ini juga didukung oleh Irawan dan Suparmoko (2008: 147) bahwa dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan ada pembangunan ekonomi kalau tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih



banyak. Jadi pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan.

Menurut Todaro (2008: 87) terdapat tiga tujuan inti dari pembangunan yaitu:

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan yang semuanya tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil tetapi juga menumbuhkan jati diri dan pribadi bangsa yang bersangkutan.
- c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa secara keseluruhan.

Sementara itu menurut Basuki dan Prawoto (2014: hal. 93) pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil mengalami peningkatan. Dalam hal ini ekonomi dikatakan tumbuh atau berkembang jika adanya pertumbuhan output riil. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yaitu apabila terdapat kenaikan output per kapita, dimana pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output riil perorang. Terdapat beberapa faktor penentu pertumbuhan ekonomi yaitu:

a) Sumber-sumber alam

Elemen ini meliputi luas tanah, sumber mineral dan tambang, iklim dan lain-lain. Terbatasnya sumber-sumber alam yang dimiliki merupakan kendala yang cukup serius dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan capital dan sumber tenaga manusia, maka lebih serius jika terdapat kendala di sumber-sumber alam

b) Sumber-sumber tenaga kerja

Masalah yang dihadapi negara berkembang dalam masalah sumber daya manusia yaitu pada umumnya jumlah penduduk banyak, pendayagunaan yang rendah, dan kualitas sumber daya tenaga kerja yang sangat rendah.

c) Kualitas tenaga kerja

Banyak negara yang tidak mampu mengadakan investasi untuk menaikkan sumber daya manusia dalam hal kesehatan, pendidikan dan latihan kerja, dengan demikian tenaga kerja yang tercipta memiliki kualitas yang rendah dan produktivitasnya juga rendah.

d) Akumulasi capital

Dalam hal ini, akumulasi capital merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memusatkan pada akumulasi capital. Hal ini dikarenakan hampir semua negara berkembang mengalami kekurangan barang-barang capital seperti mesin, peralatan produksi, pabrik fasilitas umum dll.

Disamping faktor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah dijelaskan di atas, menurut Jhingan (2009: 157) terdapat pula

beberapa faktor non-ekonomi yang dapat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu:

a) Faktor Sosial

Di negara terbelakang terdapat tradisi sosial dan budaya yang tidak menunjang perkembangan ekonomi, misalnya sikap orang yang menyerah kepada takdir dan tidak suka kerja keras, lebih menghargai waktu senggang, kesenangan, pesta-pesta dan adat kebiasaan. Dengan begitu masyarakat menghasiskan uang kepada usaha-usaha non-ekonomi. Dengan kata lain, pandangan budaya bertentangan dengan pembangunan ekonomi.

Demi kemajuan ekonomi suatu negara maka diperlukan perubahan pada lembaga terkait sehingga tabungan dapat lebih ditingkatkan dan dapat dialihkan menjadi modal yang produktif. Dengan demikian maka perlu didirikan lembaga keuangan negeri maupun swasta seperti bank tabungan, bank investasi, bursa modal dll. Sementara itu untuk menutupi kekurangan di bidang manajer, ilmuwan, administrator dan ahli lainnya lembaga-lembaga tersebut harus didirikan untuk mendidik dan melatih mereka, namun masalah yang pelik dihadapi yakni upaya untuk meningkatkan jumlah wiraswasta. Upaya tersebut tidak bergantung pada lembaga apapun tetapi kepada seluruh lingkungan negara tersebut.

b) Faktor Manusia

Faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sumber daya manusia. Dimana pertumbuhan ekonomi sendiri tidak hanya tergantung pada jumlah sumber daya manusianya saja tapi juga lebih kepada efisiensinya. Jumlah penduduk yang meningkat tajam bisa menjadi

penghambat bagi pembangunan ekonomi. Dengan pembentukan modal dan pendapatan perkapita yang rendah membuat suatu negara semakin sulit untuk menopang pertumbuhan jumlah penduduk tersebut.

Dengan begitu, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dapat menggunakan sumber daya manusia secara tepat dengan cara berikut. Yang pertama adalah harus adanya pengendalian perkembangan penduduk. Hal ini dapat dilakukan dengan program keluarga berencana dan penelitian atas penduduk untuk menurunkan angka kelahiran. Yang kedua adalah dengan adanya perubahan pandangan tenaga buruh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas buruh agar menerima arti penting dan martabat buruh. Hal ini diperlukan perubahan dalam faktor kelembagaan dan sosial. Dimana peran pendidikan sangat penting karena hanya tenaga buruh yang terdidik dan terlatih dengan tingkat efisien yang tinggi yang dapat membawa masyarakat kepada pembangunan ekonomi yang pesat.

#### c) Faktor Politik dan Administratif

Penghambat besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah struktur politik dan administrasi yang lemah. Professor Lewis berpendapat bahwa dalam merangsang dan mendorong ekonomi tindakan pemerintah memiliki peran yang penting. Dimana stabilitas, ketertiban dan adanya perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan, dengan adanya pasar yang luas, mobilitas faktor dan kemajuan teknologi dapat membantu untuk merangsang usaha dan inisiatif. Hal itu dapat dicapai jika administrasi yang bersih dan kondisi politik yang stabil.

## 2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berikut teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berhasil penulis rangkum:

### 1. Teori David Ricardo (1917)

Teori ini merupakan teori pengembangan dari teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Adam Smith, dimana perpacuan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk dan dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai keadaan yang stasioner. Dalam hal ini Ricardo menyatakan bahwa jumlah penduduk ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku. Jika tingkat upah diatas upah yang disebutnya pas-pasan untuk hidup maka orang merasa hidup sejahtera dan akan menambah jumlah anak, sementara jika tingkat upah dibawah tingkat upah yang pas-pasan maka jumlah penduduk akan turun. Dalam jangka panjang tingkat upah akan cenderung sama dengan tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup sehingga tidak ada dorongan untuk bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Oleh karena itu Ricardo mengasumsikan dalam jangka panjang jumlah penduduk akan konstan, karena output tergantung pada jumlah penduduk maka diperkirakan dalam jangka panjang output nasional akan cenderung tumbuh konstan, sehingga pendapatan perkapita akan konstan.

### 2. Teori Arthur Lewis (1954)

Menurut teori ini terdapat jumlah penduduk (tenaga kerja) yang melimpah dan tidak terbatas di negara berkembang. Sehingga berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sektor industri dapat dipasok oleh

tenaga kerja dari pertanian/daerah pedesaan yang merupakan sektor tradisional. Jumlah tenaga kerja yang tidak terbatas akan memungkinkan perkembangan ekonomi di sektor industri yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak harus diikuti oleh kenaikan tingkat upah buruh. Teori Lewis disimpulkan bahwa ketika kapitalis meningkatkan kesejahteraannya maka kehidupan buruh tetap pas-pasan. Sebagai catatan akhir bahwa teori Lewis banyak digunakan untuk menganalisis kondisi negara berkembang dengan jumlah penduduk yang melimpah.

### 3. Teori Harrod Domar (1957)

Inti dari teori ini adalah pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tingkat tabungan. Jika tingkat tabungan rendah maka pertumbuhan ekonomi akan rendah juga, dan sebaliknya. Teori makro dalam ekonomi klasik menekankan bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi terletak pada sisi supply. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh JB Say bahwa *supply creates its own demand*, bahwa supply menciptakan permintaan dengan sendirinya. Sedangkan disisi lain Keynes menyatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi terletak pada sisi pengeluaran. Pendapatan nasional akan mengalami peningkatan jika terdapat perubahan dalam pengeluaran rumah tangga (konsumsi), perusahaan (investasi) atau pemerintah (government expenditure). Harrod Domar pada dasarnya mengingatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi hanya akan terjamin apabila terjadi keseimbangan antara sisi produksi (Klasik) dengan sisi pengeluaran (Keynes).

#### 4. Teori pertumbuhan Rostow (1953)

Dalam bukunya Hudiyanto (2015) dalam teori ini, Rostow membagi proses perkembangan ekonomi suatu negara menjadi lima tahap:

##### a. Tahap Masyarakat Tradisional (*traditional society*)

Pada tahap ini dimana masyarakat masih menggunakan cara produksi yang tradisional dengan menekankan berbagai persoalan pada nilai-nilai pemikiran yang tidak rasional berdasarkan atas hal yang berlaku secara turun temurun. Diantara ciri-ciri dari masyarakat ini adalah: (i) produktifitas dan produksi per kapita yang dihasilkan oleh penduduk masih rendah, (ii) struktur sosial masih bersifat hirarkis yaitu tersusun dari atas ke bawah (berdasarkan atas tingkatan kebangsawanan), (iii) dalam pemerintahan masih sering terjadi sentralisasi.

##### b. Tahap Prasyarat Untuk Lepas Landas (*precondition to take off*)

Pada tahap ini sudah memasuki pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus tumbuh (*self sustained growth*). Ciri pada masa ini yaitu: (i) adanya peningkatan tabungan masyarakat selanjutnya akan meningkatkan investasi, (ii) investasi di sektor prasarana mengalami peningkatan, (iii) adanya aktivitas inovatif, tahap ini dapat dicapai dengan adanya campur tangan dari luar yaitu masyarakat yang sudah maju.

##### c. Tahap Tinggal Landas (*take off*)

Tahap ini dapat ditandai dengan tersingkirnya hambatan yang dapat menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Terdapat ciri-ciri pada masa ini yaitu: (i) adanya peningkatan investasi dari 5 menjadi 10 persen dari produk nasional neto, (ii) terdapat perkembangan satu atau beberapa sektor dengan

tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, (iii) terciptanya suatu kerangka dasar politik sosial dan kelembagaan yang mampu menciptakan perubahan bagi perluasan sektor modern.

d. Tahap Dorongan Kearsah Kedewasaan (*drive to maturity*)

Pada tahap ini ditandai dengan adanya diversifikasi produk pada industri dasar. Pada masa ini industri pengolahan bergeser dari industri barang modal menjadi industri barang konsumsi untuk konsumen domestik, dimana pada tahap ini mengalami perkembangan dalam penerapan teknologi modern secara efektif terhadap sumber daya yang dimiliki

e. Tahap Konsumsi Massal Tinggi (*high massconsumption*)

Pada tahap ini yang mendominasi perekonomian adalah industri dasar, sedangkan sektor primer (pertanian dan pertambangan) mengalami penurunan konsumsi massal pada produk mewah. Konsumsi bukan hanya sekedar pada barang kebutuhan pokok saja namun juga pada barang mewah.

5. Teori Joseph Schumpeter (1911)

Joseph Alois Schumpeter menjelaskan teori pertumbuhan pertama kali dalam buku *Theory of Economic Development* yang terbit di Jerman pada tahun 1911 (muncul 1934 dalam edisi Inggris), kemudian direvisi dalam *Business Cycles* (1939) dan *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942) tanpa mengalami perubahan yang penting.

Dalam teori ini menjelaskan bahwa Schumpeter menekankan pada pentingnya inovasi sebagai sumber utama pembangunan. Inovasi yang dimaksud adalah sebagai penerapan hal hal (teknologi) baru di masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa. Hal itu bisa berupa penemuan produk



baru, penemuan sumber bahan baku baru, penemuan teknik produksi baru, penemuan pasar baru, maupun penemuan manajemen baru yang lebih efisien. Kapan terjadinya inovasi ini menurut Schumpeter tidak bisa diprediksi karena merupakan hasil dari suatu kreatifitas. Oleh karena itu pembangunan tidak akan berjalan dengan mulus melainkan akan berupa ledakan yang tidak bisa diprediksi, sesuai dengan sifat dan perkembangan kreatifitas manusia.

### **2.1.1. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Menurut Arsyad (2002: 97) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses untuk mengelola sumber daya-sumber daya yang ada disuatu daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta membentuk kemitraan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah atau daerah tersebut. Dimana proses pembangunan ekonomi daerah meliputi pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru.

Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu untuk meningkatkan jenis dan jumlah peluang kerja untuk masyarakat daerah, untuk mencapai tujuan ini diperlukan peran pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama untuk mengambil inisiatif pembangunan daerah.oleh sebab itu pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu menggali potensi-

potensi sumber daya yang diperlukan dalam merancang dan membangun ekonomi daerah.

Dalam Arsyad (2002: 101) Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah sebagai berikut:

#### 1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan sehingga peranan teori ekonomi neo klasik ini tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional). Dalam teori ini terdapat dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu mobilitas faktor produksi dan keseimbangan (*equilibrium*) artinya jika modal bisa mengalir tanpa batasan (restriks) maka sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya. Oleh sebab itu modal akan mengalir dari daerah yang memiliki upah tinggi ke daerah yang berupah rendah.

#### 2. Teori Basis Ekonomi

Dalam teori ini menyatakan bahwa permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah merupakan faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sumber daya lokal termasuk didalamnya tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor digunakan dalam pertumbuhan industri yang akan menghasilkan penciptaan lapangan kerja dan kekayaan daerah.

Kelemahan dalam teori ini yaitu didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Hal ini akan memberi dampak berupa ketergantungan yang tinggi terhadap kekuatan pasar nasional maupun global. Namun, model teori ini sangat berguna dalam menentukan keseimbangan antara jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat dalam mengembangkan stabilitas ekonomi.

### 3. Teori Lokasi

Ekonom regional menyatakan bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu lokasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan akan memilih lokasi yang dapat meminimumkan biaya, sehingga dapat memaksimalkan peluang mendekati pasar. Terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi kualitas atau suitability suatu lokasi misal upah tenaga kerja, ketersediaan pemasok, biaya energi, fasilitas pendidikan dan latihan, komunikasi, sanitasi, kualitas pemerintahan daerah dan tanggungjawabnya. Namun, keterbatasan dalam teori ini adalah pada saat sekarang teknologi dan komunikasi mengubah signifikansi suatu lokasi untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

### 4. Teori Tempat Sentral

Teori ini menganggap bahwa terdapat hirarki tempat (*hierarchy of places*), maksudnya yaitu terdapat tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku) untuk mendukung tempat sentral ini. Selain itu, teori tempat sentral ini dapat diaplikasikan pada pembangunan suatu daerah, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan.

### 5. Teori Kausasi Kumulatif

Konsep dasar dari kausasi kumulatif ditunjukkan oleh kondisi daerah sekitar kota yang semakin buruk. Dengan adanya kekuatan pasar membuat kesenjangan yang semakin parah antara daerah-daerah tersebut, dimana daerah maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah lainnya.

### 6. Model Daya Tarik (Attraction)

Model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu teori daya tarik industri. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah melalui pemberian subsidi dan insentif, masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya.

### **2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu unit usaha ekonomi daerah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB ini sangat penting untuk ditampilkan karena dapat dijadikan indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan suatu daerah. Menurut Miroah (2015) terdapat dua cara dalam penyajian PDRB yaitu: PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ialah jumlah nilai tambah produksi atau pendapatan/pengeluaran yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun yang dinilai berdasarkan harga tetap (harga pada tahun dasar), perhitungan PDRB ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektor maupun secara agregat (keseluruhan) dan untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah berdasarkan distribusi masing-masing sektor terhadap total nilai PDRB. Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu jumlah nilai tambah produksi atau pendapatan/pengeluaran yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku, perhitungan perbandingan PDRB ADHB dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya.

Menurut Widodo dalam Miroah (2015) perhitungan PDRB menggunakan tiga pendekatan yaitu:

a. PDRB menurut pendekatan produksi

Produk Domestik Regional Bruto menurut pendekatan produksi dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Unit produksi tersebut dibagi dalam Sembilan sektor atau lapangan usaha yaitu a) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, b) Pertambangan dan Penggalian, c) Industri Pengolahan, d) Listrik, Gas dan Air Bersih, e) Bangunan, f) Perdagangan, Hotel dan Restaurant, g) Pengangkutan dan Komunikasi, h) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, i) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

b. PDRB menurut pendekatan pendapatan

Merupakan balas jasa dalam proses produksi yang diterima oleh faktor-faktor produksi disuatu wilayah atau daerah dalam periode waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi meliputi balas jasa tenaga kerja berupa gaji dan upah, balas jasa tanah berupa sewa tanah, balas jasa modal berupa bunga modal dan balas jasa kewiraswastaan berupa keuntungan, semuanya itu sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c. PDRB menurut pengeluaran

Merupakan seluruh komponen dari pengeluaran akhir yang meliputi:

- (a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan stok, dan (e) ekspor netto (dimana ekspor dikurangi oleh impor).

### **2.1.3. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah**

Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi yang utama adalah untuk memberikan kesempatan kerja bagi penduduk. Selanjutnya untuk mencapai stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha seperti lahan, keuangan, dan infrastruktur. Selain sukses, pembangunan ekonomi akan berkah apabila aktifitas di dalamnya terhindar serta terbebas dari praktek-praktek *ribawi*. Tujuan berikutnya, untuk mengembangkan sektor basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Hal ini sebagai antisipasi kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral yang akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat.

Secara garis besar, strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: (1) Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas, (2) Strategi Pengembangan Dunia Usaha, (3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia, (4) Strategi Pengembangan Masyarakat. (Evi dan Hastarini, 2008:167)

### **2.1.4. Tipologi Ekonomi Regional**

Menurut Leo Klassen (1965) analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah (Emilia, 2006:55). Kemudian daerah yang diamati dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu:

- a) Daerah cepat maju dan cepat tumbuh

- b) Daerah maju tapi tertekan
- c) Daerah berkembang cepat
- d) Daerah relatif tertinggal

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel.2.1.  
Tipologi Daerah**

<b>PDRB perkapita (y)</b> <b>Laju Pertumbuhan (r)</b>	<b><math>y_i &gt; y</math></b>	<b><math>y_i &lt; y</math></b>
<b><math>r_i &gt; r</math></b>	Daerah maju dan Tumbuh Cepat	Daerah berkembang Cepat
<b><math>r_i &lt; r</math></b>	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Sumber: Mudrajat Kuncoro dalam Nudiatulhuda (2007)

Keterangan:

$r$  = Rata-rata pertumbuhan kabupaten/kota

$y$  = Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota

$r_i$  = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati

$y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati

## **2.3 Kebijakan Pemerintah**

### **2.3.1 Pengertian Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus**

Sesuai dengan UUD Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah „tertentu“ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Sedangkan Dana Otonomi Khusus, yaitu dana yang diberikan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah „tertentu“ untuk membangun sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada daerah tertentu agar dapat menata lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya (UUD, 1945).

### **2.3.2 Manfaat Dana Otonomi Khusus**

Nova Iriansyah (2016) dengan adanya limpahan dana otonomi khusus seharusnya Provinsi Aceh harus lebih maju atau menjadi pendorong kuat untuk mengejar ketertinggalan akibat konflik dan bencana. Keberhasilan kinerja di Aceh setidaknya mensyaratkan pada akumulasi dari produktifitas setiap komponen pembangunan untuk menyumbangkan produktifitasnya demi tercapainya percepatan pembangunan dan kemandirian.

### **2.3.3 Daerah Yang Diberikan Otonomi Khusus**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.



### **2.3.4 Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus**

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 23 perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Provinsi Aceh diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

### **2.3.5 Landasan Hukum Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus**

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain: Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan

di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.

Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Implementasi formal penegakan syariat Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

### **2.3.6 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Realisasi Anggaran**

Telah dijelaskan bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada lima hal yaitu kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sosial. Terdapat dalam Pasal 183 UU. No 11 Tahun 2006 yaitu:

1. Dana kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, digunakan untuk penyediaan obat-obatan pada Rumah Sakit, agar setiap rakyat Aceh yang berobat tidak dipungut bayaran, Pembangunan pos-pos kesehatan, memberikan bonus pada para medis dan lain-lain.
2. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, membangun asrama-asrama mahasiswa yang melanjutkan studi di luar Provinsi Aceh, mensubsidi Yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain.
3. Dana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), digunakan untuk membantu pemberian modal kepada rakyat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonomi.
4. Dana Infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, jalan-jalan yang konsentrasi pemukiman rakyat Aceh, rehabilitasi atau membangun rumah-rumah sederhana untuk rakyat Aceh yang tidak mampu dan lain sebagainya.
5. Dana Sosial yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Sosial, digunakan untuk membantu rakyat Aceh dalam pengetasan masalah sosial, korban bencana

alam, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial Akibat Konflik.(UUD, 1945)

### **2.3.7 Peraturan Gubernur Aceh**

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang pagu indikatif, kriteria dan persyaratan seleksi program / kegiatan pembangunan sumber tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus tahun anggaran 2017. Dalam peraturan gubernur aceh nomor 6 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

- 1) Pengalokasian dana otsus, dilakukan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, selain itu juga dialokasikan paling banyak 1% (satu persen) untuk pembangunan ibu kota provinsi; 27
  - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (foundation grants) dan alokasi formula (formula based grants), dengan perincian :
    1. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
    2. 70% (tujuh puluh persen) lainnya dibagikan dengan mempertimbangkan indikator:
      - a) jumlah penduduk 30% (tiga puluh persen)
      - b) luas wilayah, 30% (tiga puluh persen)
      - c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 30% (tiga puluh persen)
      - d) Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), 10% (sepuluh persen)

3. Realisasi kapasitas fiskal Kabupaten/Kota tahun sebelumnya yang terdiri atas:
  - a) dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
  - b) dana alokasi umum; dan
  - c) dana alokasi khusus.
- 2) Dana Otsus sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk transfer. Adapun penyusunan program dan kegiatan yang ditercantum dalam pasal 7 yaitu:
  - a. Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Dana Otsus alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditunjukkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.
  - b. Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/kota (RPJPK), Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten/kota (RPJMK), RKP Kabupaten/Kota mengacu pada dokumen perencanaan provinsi.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai sektor basis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis shift-share dan LQ. Selain menggunakan analisis tersebut, ada pula yang menggunakan analisis klasen tipologi atau analisis LQ digabungkan dengan klasen tipologi dan Logistic Regression. Wali I Mondal (2009) hasil analisis mengenai potensi pembangunan industrial di Malaysia. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan pendekatan shift-share menunjukkan bahwa Malaysia mempunyai sektor basis di wilayah Klantan, Terengannu, Pahong dan Johar Utara dimana ke empat wilayah tersebut mempunyai mix industri yang unik dibandingkan wilayah lainya di Malaysia, hal tersebut didukung dengan sumberdaya alam yang berlimpah. Pada Semenanjung Malaysia kaya akan sektor pertanian dan sector perikanan, selain itu konstribusi sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam perekonomian Malaysia.

Agus Tri Basuki (2009) hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Yapen, Provinsi Papua Tahun 2004-2008. Kabupaten kepulauan Yapen adalah sebuah kabupaten yang baru sebagai hasil pemisahan regional dan terletak di daerah yang sangat dekat ke leher kepala butung Provinsi Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Yapen memiliki Keuntungan ekonomi di sebagian besar sektor kecuali sektor pertambangan dan industri manufaktur.

Sektor yang paling menguntungkan adalah keuangan,, persewaan, dan jasa perusahaan jasa, serta sektor konstruksi. Sektor lain yang menguntungkan adalah industri wisata, seperti perdagangan, hotel dan restoran. Secara lengkap penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

No.	Nama/Tahun/Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Tri Kurniawati R. (2009) Analisis potensi ekonomi di Kalimantan Tengah 2000-2007.	- Tipologi Klassen - Location Quotient/ LQ - Shift Share/ SS	- Hasil Tipologi Klassen : Sebagian besar daerah di Kalimantan Tengah berada pada kuadran kedua, yaitu Kota Waringin Timur, Kapuas, Pulang Pisau serta Gunung Mas. - Hasil LQ dari 14 Kabupaten, Sebanyak 13 Kab. Memiliki sektor unggulan yang sama, yaitu sektor bangunan. - Hasil Shift Share, hampir semua Kabupaten di Kalimantan Tengah, memiliki keunggulan dalam sektor bangunan, namun secara kompetitif sektor-sektor di kalimantan Tengah belum mampu bersaing pada tingkat Propinsi.
2	Nudiatulhuda Mangun (2007) Analisis Potensi Ekonomi Kab. Dan Kota di Propinsi Sulawesi Tengah	- Location Quotient/ LQ - Model Rasio Pertumbuhan / MRP - Shift Share/ SS - Metode SIG	- Hasil analisis LQ menunjukkan sector pertanian merupakan sector basis yang dominan di Prov. Sulawesi Tengah. - Hasil analisis MRP menunjukkan tak satupun kab/kota di Prov. SulTeng, mempunyai potensi daya saing kompetitif dan komparatif
3	Aditya Nugraha Putra (2013) Analisis Potensi Ekonomi Kab/ Kota di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	- Location Quotient/ LQ - Model Rasio Pertumbuhan / MRP - Overlay - Shift Share/ SS	- Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan serta sektor jasa-jasa merupakan sector basis yang dominan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena terdapat di tiga kabupaten/kota dari lima kabupaten/kota. - Hasil analisis MRP yang di overlay menunjukkan bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi DIY yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komperatif

			<p>terhadap sector ekonominya. Sektor tersebut adalah sector bangunan di Kabupaten Bantul, kemudian sektor bangunan serta sektor perdagangan hotel dan restoran di Kabupaten Sleman begitu juga untuk sektor perdagangan, hotel dan resetoran serta sector pengangkutan dan komunikasi di Kota Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil analisis Shift-Share di Provinsi DIY menunjukkan bahwa Sektor pertanian mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di 3 kabupaten yaitu Kulon Progo, Bantul dan Sleman.</li> <li>- Sektor bangunan mempunyai keunggulan kompetitif dan Spesialisasi di Kabupaten Bantul. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di Kabupaten Sleman.</li> </ul>
--	--	--	--

## 2.5 Tahapan Penelitian

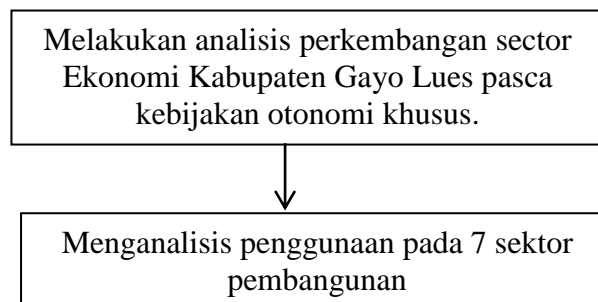
Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Aceh. Analisa tentang Potensi Ekonomi pasca kebijakan otonomi khusus sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang. Dengan diketahuinya potensi ekonomi yang berdaya saing tinggi pasca kebijakan otonomi khusus tersebut maka pembangunan daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan menciptakan pengembangan wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi, pergeserannya, serta

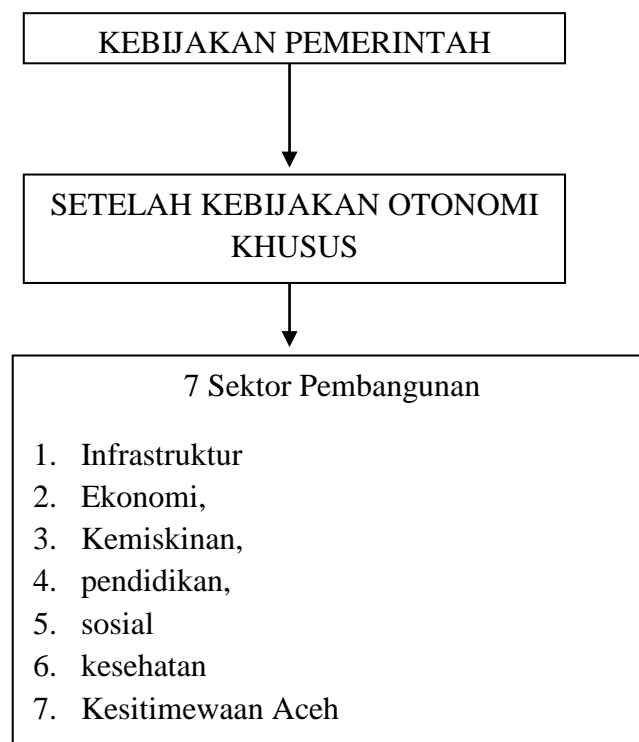


menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. Perkembangan Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena, itu strategi pembangunan diupayakan untuk menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Tahapan penelitian sebagai berikut:



Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana deskriptif analisa adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini akan dideskripsikan tentang potensi ekonomi pasca kebijakan otonomi khusus Gayo Lues di Provinsi Aceh.

### **3.2 Definisi Operasional Konsep/ Variabel**

Variabel penelitian terdiri dari indikator-indikator sosial dan ekonomi. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Hasan, 2002). Secara teoritis, variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini untuk mengukur indikator potensi ekonomi pasca kebijakan otonomi khusus variabel yang digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi pasca kebijakan otonomi khusus adalah;

Tabel 3.1  
Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi	Sumber Data
a) Pertumbuhan ekonomi	Proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.	www.bps.go.id
b) PDRB	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.	www.bps.go.id
c) Struktur Ekonomi	Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier	www.bps.go.id
d) Dana Otonomi Khusus	Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah	www.bps.go.id

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat: Penelitian ini dilaksanakan di BPS Gayo Lues dan BPS Provinsi Aceh melalui penelitian sekunder yang telah dituliskan di Badan Pusat statistik yang merupakan laporan statistik kabupaten dan provinsi setiap tahun. Waktu penelitian: penelitian dilakukan terhitung dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019.

Tabel III.I  
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				January				February				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	pengajuan judul ,dan pengesahan judul	■																			
2	Penulisan Proposal									■											
3	Seminar Proposal													■							
4	Analisis Data																	■			
5	Penulisan laporan																	■			
6	Sidang Meja Hijau																				

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### A. Jenis data

Data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian atau dengan mengambil dari sumber lain yang diterbitkan oleh lembaga yang dianggap kompeten berupa data PDRB Gayo Lues selama lima tahun, data PDRB Aceh selama lima tahun, dan lain-lain.

#### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai macam sumber yang diperoleh melaluidata sekunder yang berasal dari BPS laporan Kabupaten Gayo Lues, laporan provinsiAceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sumber lain seperti internet dan studi kepustakaan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka ditempuh cara sebagai berikut :

- 1) Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari berbagai dokumen, buletin, artikel-

artikel dan karya ilmiah (skripsi) yang berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder.

- 2) Studi lapang objek (*field research*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan menempuh cara observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa metode analisis data, yaitu: dengan menggunakan Metode Analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ diperlukan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi di daerah penelitian dan membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peran kegiatan ekonomi sejenis pada lingkup yang lebih luas (Provinsi).

$$LQ = (X_i / X) / (Y_i / Y)$$

Keterangan :

LQ : *location quotient*

X<sub>i</sub> : nilai tambah sektor i di Kabupaten Gayo Lues

X : total PDRB Kabupaten Gayo Lues

Y<sub>i</sub> : nilai tambah sektor i di Kabupaten Gayo Lues

Y : total PDRB Kabupaten Gayo Lues

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Otonomi Khusus Dan Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues**

##### **4.1.1 Sejarah Otonomi Khusus Aceh**

Aceh dalam akar sejarahnya dikenal sebagai bangsa yang teguh mempertahankan kedaulatannya dari kolonialisme Belanda dan Inggris. Paska ditandatanganinya Treaty of Sumatera Tahun 1871 yang berisikan penyerahan Aceh dari Inggris kepada Belanda yang berbuah perang panjang yakni tahun 1873-1914, pergolakan demi pergolakan terus dilakukan guna mengusir para penjajah. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia menyatakan merdeka, residen Teungku Nyak arief dan Teungku Daud Beureueh sepakat untuk menggabungkan diri dengan Republik Indonesia (Guru, 2000).

Kemudian, terjadi beberapa perselisihan akibat ketidakpuasan atas keputusan politik Republik Indonesia dibawah kabinet Hatta, benih gerakan separatis pun tumbuh. Daud Beureueh menggabungkan diri sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo di Aceh Barat, dikarenakan rasa kecewa elit Aceh atas keputusan “Politik Jakarta” yang hanya menjadikan Aceh daerah setingkat Kabupaten dibawah Provinsi Sumatera Utara, sehingga demikian secara yuridis otomatis Provinsi Aceh dibubarkan begitu saja.

Mudayat (1996) mendefenisikan pilihan memberikan otonomi khusus sebagai affirmative action pun dilakukan guna meredam konflik dan mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh, genjatan senjata dilakukan dengan

syarat Aceh tidak hanya 17 dijadikan daerah Provinsi tapi lebih dari itu yaitu diakui sebagai Negara Bagian Aceh (NBA). Pendukung NBA ini antara lain adalah Hasan Ali, Hasan Saleh, dan Ishak Amin. Mereka bersepakat dengan wakil pemerintah yaitu Ali Hasjmy, Gaharu, dan Muhammad Insja (kepala polisi).

Mereka sepakat dengan tiga tujuan utama yaitu

- 1) Memajukan Islam:
- 2) Membangun Aceh dalam arti luas:
- 3) Berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat Aceh.

Kesepakatan tersebut setelah dilakukan beberapa penyesuaian akhirnya diberikan landasan yuridis dengan diterbitkannya Keputusan Wakil Perdana Menteri RI No.1/Misi/1959 tanggal 31 Mei 1959, yaitu dengan pembentukan daerah Istimewa Aceh berdasarkan UU No.1 tahun 1957 yang menganut otonomi yang seluas-luasnya terutama di bidang agama, pendidikan, dan adat (Haris ,1999).

Akan tetapi pada perjalanannya pemberian otonomi tersebut tidak efektif pelaksanaannya, karena pada dekade 1960-an NKRI disibukkan dengan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda dan konfrontasi Ganyang Malaysia yang memberikan Presiden Soekarno common enemy untuk diberantas sehingga konsentrasi kewenangan secara de facto tertumpu di tangan Presiden Soekarno, yang pada gilirannya mengakibatkan pelaksanaan otonomi daerah menjadi biasa uncaknya pada era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto menerbitkan UU No.5 tahun 1974 yang justru 18

memperteguh sistem pemerintahan sentralistik di Indonesia sehingga mematikan inisiatif, membelenggu kewenangan, membunuh kearifan adat istiadat lokal yang dipaksakan untuk menjadi seragam. Akumulasi dari kekecewaan atas kebijakan tersebut maka pada tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pasca berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya Reformasi. Pemerintah mulai menyadari bahwa bukanlah jalan yang tepat untuk mengatur wilayah otonomi Pasca berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya Reformasi. Pemerintah

Sadar bahwa tindakan represif melalui penetapan DOM (Daerah Operasi Militer) gagal menyelesaikan akar permasalahan separatisme di Aceh, pemerintah RI mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan GAM, yaitu dengan kembali melakukan perundingan dan dialog. Dari serangkaian perundingan 19 yang dilakukan sejak pengesahan UU No 18 tahun 2001, pada akhirnya pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, akhirnya keluarkan kata mufakat dengan ditanda tangannya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM.

Salah satu klausul kesepakatan itu, materi MoU Helsinki akan dituangkan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Untuk memenuhi klausul di atas, maka pada 11 Juli 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan 20 12. Pengelolaan Sumber Daya Alam 13. Keuangan 14. Pertanahan Lahirnya Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu momentum sejarah yang cukup penting dalam perjalanan bangsa Indonesia,



khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-Undang ini kita sama-sama berharap dapat mengakhiri konflik berdarah dari gerakan separatisme yang sudah menyengsarakan seluruh pihak, sehingga terbuka kembalilah pintu menuju perdamaian yang hakiki di Aceh, terciptanya masyarakat yang madani, adil, bermatabat dan sejahtera, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan yang dahulu semat terpinggirkan.

UUPA sejauh ini cukup sukses dalam menyelesaikan permasalahan separatisme di Aceh, hal ini dapat kita lihat setelah adanya Otsus yang diberikan melalui UUPA, terjadi transformasi, kekuatan GAM ke dalam struktur pemerintahan modern dalam NKRI yang buahnya adalah peningkatan integrasi dan sinergitas bersama seluruh elemen. Dan tentu saja seluruh masyarakat Aceh berharap bahwa dengan adanya UUPA mampu menjadi titik pijak/fondasi untuk menciptakan Aceh yang sejahtera, kemudian dalam urgensi dalam aspek percepatan pembangunan maka pemberian kewenangan yang besar ini berakibat pula dengan perubahan pola financieele verhouding (perimbangan keuangan) maka secara logis otonomi khusus yang 21 diberikan dibarengi pula dengan hubungan keuangan, yang kongkritnya Negara menyediakan sebesar 2% dari DAU Nasional selama 15 tahun dan 1% DAU Nasional untuk 5 tahun berikutnya dalam jangka waktu 20 tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 UU No. 11 Tahun 2006 untuk Pemerintah Aceh, ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi Aceh untuk merealisasikan percepatan pembangunan tersebut melalui program prioritas yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

#### **4.1.2. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues**

##### **A. Gambaran Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues**

Dengan berlakunya UU No 5 Tahun 1974, maka status Kewedanaan diganti dengan sebutan Pembantu BuGayo Lues. Namun sejak tahun 1975 s.d 1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena Gayo Lues dijadikan daerah koordinator Pemerintahan untuk 4 Kecamatan. Baru pada tahun 1982 Kewedanaan Gayo Lues dijadikan Wilayah Pembantu BuGayo Lues Gayo Lues dipimpin oleh Pembantu BuGayo Lues.

Berhubung karena keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan lagi pula minimnya PAD Aceh Tenggara ada kesan kemajuan pembangunan Gayo Lues dianaktirikan, pada pertengahan tahun 90-an transportasi Gayo Lues agak mendekati titik terang dengan berfungsinya sarana jalan, sehingga menjadikan Kota Blang Kejeren sebagai simpang empat, yaitu : Blang Kejeren – Takengon ; Blang Kejeren – Aceh Selatan ; Blang Kejeren Kutacane dan Blang Kejeren – Aceh Timur.

Hal ini memicu percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Gayo Lues yang mendukung PMDN dan PMDA untuk menanam modal. Faktor intern di atas ditambah lagi dengan faktor ekstern dengan diresmikannya Pembantu BuGayo Lues Simeulu menjadi Kabupaten Administratif, menyusul Pembantu BuGayo Lues Bireuen dan Pembantu BuGayo Lues Singkil menjadi Kabupaten. Hal inilah yang merangsang masyarakat gayo Lues untuk mengikuti jejak daerah tersebut di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blang Kejeren untuk memperjuangkan

Gayo Lues menjadi Kabupaten Administratif. Untuk itu dibentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Gayo Lues Gayo Lues Blang Kejeran, Kabupaten Aceh Tenggara.

Maksud dan tujuan panitia ini disampaikan kepada Gayo Lues Aceh Tenggara. Bertepuk tidak sebelah tangan, Gayo Lues sangat setuju dan mendukung gagasan yang baik ini. Panitia meminta BuGayo Lues agar menyurati Gubernur dan Ketua DPRD I Aceh. Permintaan ini disanggupi Gayo Lues dan Ketua DPRD II Aceh Tenggara dengan mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD Aceh.

Petinggi Aceh lalu menyurati menteri yang terkait di Jakarta termasuk pimpinan DPR, pimpinan Parpol dan lain-lain yang di rasa patut. Proses di Jakarta sedikit agak terhambat mengingat situasi negarapun belum begitu stabil. Karena itu Panitia, Pemerintah Daerah Aceh Tenggara masyarakat Gayo Lues yang berdomisili di Jakarta berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa biaya yang berlimpah, bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya sebuah Kabupaten.

Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara untuk penajakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR dan Pimpinan parpol untuk mohon bantuan. Setelah melalui proses yang agak panjang akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001 DPOD menetapkan 4 Calon Kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi Kabupaten, sedangkan Gayo Lues dikaji ulang. Masyarakat Gayo Lues, Pemda Aceh Tenggara, Pemda Daerah Aceh, merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi lagi ke Jakarta menemui Petinggi di Jakarta termasuk Wapres.

Kepada mereka dimohon dengan hormat agar Gayo Lues dapat diluluskan menjadi Kabupaten. Akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU pembentukan Kabupaten Gayo Lues ke DPR-RI. Dalam sidang Paripurna DPR-RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya.

Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah Kabupaten. Pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD, Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM menjadi Penjabat BuGayo Lues Gayo Lues di Kutacane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah Kabupaten yang dicita-citakan.

#### **Arti Logo**



**Gambar 4.1**

**Logo Kabupaten Gayo Lues**

<b>Unsur-Unsur</b>	<b>Melambangkan</b>
<b>Periuk Tanah</b>	<b>Masyarakat Gayo Lues Yang Masih Menjunjung Tinggi Tradisi</b>
<b>Bintang</b>	<b>Keimanan Yang Teguh Yang Diiringi Dengan Ketaqwaan</b>
<b>Tulisan “Gayo Lues”</b>	<b>Identitas Kabupaten Gayo Lues</b>
<b>Padi Dan Kapas</b>	<b>Kesejahteraan Sosial Yang Berkeadilan</b>
<b>Daun Tembakau</b>	<b>Kesuburan Daerah Gayo Lues Sebagai Kabupaten Agraris</b>
<b>Lingkar Putih</b>	<b>Kestrategisan Daerah Gayo Lues Yang Terletak Di Tengah-Tengah Provinsi Aceh</b>
<b>Gugusan Pegunungan</b>	<b>Kabupaten Gayo Lues Yang Terletak Pada Kawasan Ekosistem Leuser Dan Dominan Akan Perbukitan Dan Pegunungan</b>
<b>Pena Dan Buku</b>	<b>Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan</b>
<b>Pita Bertuliskan “Musara”</b>	<b>Masyarakat Gayo Lues Sangat Menjunjung Tinggi Persatuan Dan Kesatuan</b>
<b>Cerana (Dalung)</b>	<b>Kehidupan Masyarakat Gayo Lues Yang Kental Akan Seni Budaya Dan Adat Istiadat</b>
<b>Garis Merah Putih</b>	<b>Gayo Lues Merupakan Bagian Dan Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>

## B. Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues

**Tabel 4.1**

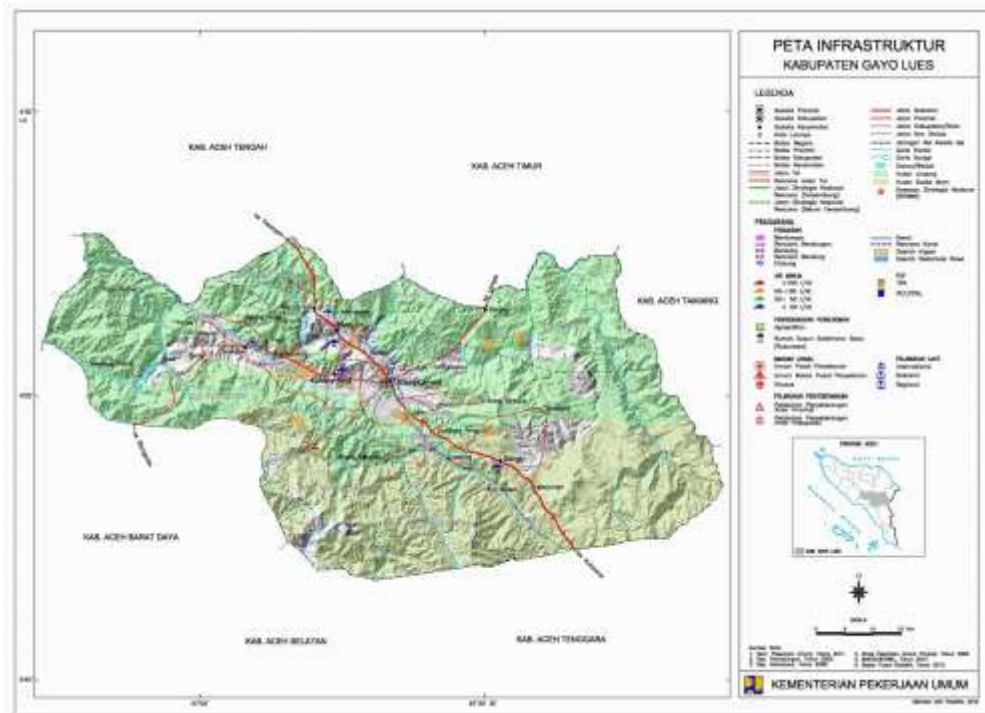
### Perbatasan Kabupaten Gayo Lues

<b>Nama Resmi</b>	: Kabupaten Gayo Lues
<b>Ibukota</b>	: Blangkejeren
<b>Provinsi</b>	: Aceh
<b>Batas Wilayah</b>	<b>Utara:</b> Kabupaten Nagan Raya, Kab.Aceh Tengah dan Kab.Aceh Timur <b>Selatan:</b> Kabupaten Aceh Tenggara dan Kab.Aceh Barat Daya <b>Barat:</b> Kabupaten Aceh Barat Daya <b>Timur:</b> Kabupaten Aceh Tamiang dan Kab.Langkat- Prov.SUMUT
<b>Luas Wilayah</b>	: 5.719,58 Km <sup>2</sup>
<b>Jumlah Penduduk</b>	: 93.136 Jiwa
<b>Wilayah Administrasi</b>	: Kecamatan : 11, Kelurahan : -, Desa :136

**Gambar 4.2**  
**Kabupaten Gayo Lues Dalam Peta Provinsi Aceh**



**Gambar4.3**  
**PetaPerbatasan Dan Infrastruktur Kabupaten Gayo Lues**



Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai luas wilayah sekitar 5.719,678 km<sup>2</sup> atau 10,3 persen dari luas Propinsi NAD. Kabupaten Gayo Lues terletak pada 3<sup>o</sup>40'46,13" – 4<sup>o</sup>16'50,45" Lintang Utara dan 96<sup>o</sup>43'15,65" – 97<sup>o</sup>55'24,29" Bujur Timur dengan ketinggian sekitar 850 meter dari permukaan laut yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasan Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser.

Kabupaten Gayo Lues berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tengah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan Besar dan Aceh Tenggara. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten

Aceh Timur dan Langkat (Sumut) dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan, 20 mukim, 143 desa (kampung), dan 1 kelurahan yakni Kelurahan Kota Blang Kejeren.

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	%
(1)	(2)	(3)	
1	Kuta Panjang	189,08	3,31
2	Blang Jerango	516,38	9,03
3	Blang Kejeren	1.139,88	19,93
4	Putri Betung	139,00	2,43
5	Debun Gelang	651,73	11,39
6	Blang Pegayon	280,71	4,91
7	Pining	1.100,00	19,23
8	Rikit Gaib	419,24	7,33
9	Pantan Cuaca	176,23	3,08
10	Terangon	645,82	11,29
11	Tripe Jaya	461,60	8,07

Dari luas Kabupaten Gayo Lues seluas 5.719,678 km<sup>2</sup> tersebut, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Blang Kejeren yakni mencapai 1.139,88 km<sup>2</sup> atau 19,93 persen dari total luas wilayah ini, kemudian Kecamatan Pining seluas 1.100 km<sup>2</sup> atau 19,23 persen. Sementara kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Putri Betung yakni seluas 139 km<sup>2</sup> atau 2,43 persen dari total luas daerah ini, kemudian Kecamatan Pantan Cuaca yakni seluas 176 km<sup>2</sup> atau 3,08 persen, kecamatan yang juga terkecil luas daerahnya adalah Kecamatan Kuta Panjang yakni 189,08 km<sup>2</sup> atau 3,31 persen dari total luas wilayah. Luas wilayah



Kabupaten Gayo Lues menurut kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### C. Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui umur dari responden. Penghitungan umur harus selalu dibulatkan kebawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian penting baik nasional maupun daerah.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk**  
**Per Tahun 2014-2017**

TAHUN	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	42 777	51 419	102 751
2015	43 607	53 142	106 266
2016	44 534	49 250	98 571
2017	50 568	50 361	100 929

Jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 berjumlah 100.929 jiwa yang terdiri dari 50.568 laki-laki dan 50.361 perempuan. Dalam artian di mana di kabupaten jumlah penduduk dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan jumlah penduduk dari 98.571 jiwa ke 100.929 jiwa. Dengan jumlah perempuan di bawah jumlah laki-laki.

#### D. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini juga tetapi harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal. berpengaruh pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta semua segi kehidupan di kabupaten Gayo Lues. Pendidikan yang merupakan komponen strategis dan mendasar untuk mendukung dan mendorong setiap upaya pembangunan sektor lainnya adalah suatu investasi yang akan memberikan hasil yang sangat besar karena pembangunan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam.

**Tabel 4.4**

**Jumlah Sekolah, Murid, Guru Dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)  
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gayo Lues**

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kuta Panjang	8	976	93	10
2	Blang Jerango	7	677	55	12
3	Blangkejeren	17	3 187	198	16
4	Putri Betung	9	890	81	11
5	Dabun Gelang	8	541	84	6
6	Blang Pegayon	3	522	40	13
7	Pining	8	572	72	8
8	Rikit Gaib	5	316	53	6
9	Pantan Cuaca	6	384	49	8
10	Terangun	12	1 050	81	13
11	Tripe Jaya	6	577	39	15
	<b>Gayo Lues</b>	<b>89</b>	<b>9 692</b>	<b>845</b>	<b>11</b>

**Tabel 4.5**

**Jumlah Sekolah,Murid,Guru Dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues**

NO	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kuta Panjang	3	281	19	15
2	Blang Jerango	3	468	42	11
3	Blangkejeren	7	1 404	129	11
4	Putri Betung	2	302	16	19
5	Dabun Gelang	4	196	30	7
6	Blang Pegayon	1	201	20	10
7	Pining	4	258	12	22
8	Rikit Gaib	1	180	12	15
9	Pantan Cuaca	2	162	13	12
10	Terangun	5	417	36	12
11	Tripe Jaya	2	213	14	15
	<b>Gayo Lues</b>	<b>34</b>	<b>4 082</b>	<b>343</b>	<b>12</b>

**Tabel 4.6**

**Jumlah Sekolah,Murid,Guru Dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues**

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	guru	Rasio guru
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kuta Panjang	1	256	27	9
2	Blang Jerango	2	286	30	10
3	Blangkejeren	5	1 192	121	10
4	Putri Betung	1	221	24	9
5	Dabun Gelang	1	160	30	5
6	Blang Pegayon	3	613	50	12
7	Pining	1	174	16	11
8	Rikit Gaib	1	224	28	8
9	Pantan Cuaca	1	106	16	7
10	Terangun	1	278	25	11
11	Tripe Jaya	1	123	14	9
	<b>Gayo Lues</b>	<b>18</b>	<b>3 633</b>	<b>381</b>	<b>10</b>

**Tabel 4.7**

**Angka Partisipasi Sekolah Menurut Umur 5 Tahun Ke Atas**

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah/School ParticiGayo Lueson		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi Not
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Laki-Laki/Male</b>	8,89	33,14	57,98
<b>Perempuan/Female</b>	15,25	28,76	55,99
<b>Laki-Laki + Perempuan/Male +female</b>	12,04	30,96	56,99

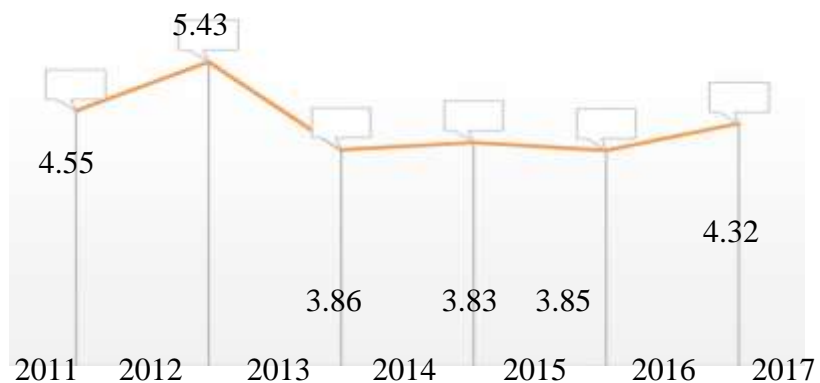
**E.Ekonomi**

**1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh penduduk di suatu daerah selama setahun. Nilai PDRB didasari atas dua komponen dasar yakni Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Untuk mencerminkan kemajuan ekonomi suatu daerah dipakai nilai PDRB ADHK sebab bila dipakai ADHB maka unsur inflasi termasuk didalamnya.

**Tabel 4.8**

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan (Persen) di Kabupaten Gayo Lues 2011 - 2016**



## **F.Kesehatan**

### **1. Prasarana**

Derajat kesehatan masyarakat merupakan suatu indikator keberhasilan pembangunan manusia di samping factor lain nya. Salah satu modal dasar pembangunan adalah sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, karena dengan keberhasilan pembangunan SDM yang sehat akan menghasilkan masyarakat yang sehat sehingga akan menjadi pelaku dan sasaran pembangunan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Gayo Lues memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program di bidang kesehatan. Tujuan dari program-program tersebut adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam intelektual, fisik, ekonomi dan moral sesuai dengan definisi Kesehatan dalam Undang-undang Kesehatan tahun 1992 bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

**Tabel 4.9**  
**Perasaran Kesehatan Kabupaten Gayo Lues Pada Tahun 2016**

<b>N0</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Rumah Sakit</b>	<b>Puskesmas</b>	<b>Puskesmas Pembantu</b>	<b>Klinik/Balai Kesehatan</b>	<b>Polindes</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kuta Panjang	0	1	2	1	9
2	Blang Jerango	0	1	3	0	7
3.	Blangkejeren	0	1	6	3	9
4	Putri Betung	0	1	4	0	9
5	Dabun Gelang	1	1	4	0	7
6	Blang	0	1	3	0	10

	Pegayon					
7	Pining	0	2	3	0	3
8	Rikit Gaib	0	1	1	0	7
9	Pantan Cuaca	0	1	3	0	9
10	Terangun	0	1	6	0	17
11	Tripe Jaya	0	1	3	0	9
Jumlah <i>Total</i>	2016	1	12	40	4	98
	2015	1	12	40	4	97
	2014	1	12	41	3	0
	2013	1	12	41	0	0

## 2. Tenaga Medis

Di samping sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya, diperlukan pula tenaga kesehatan di mana jumlahnya juga masih tergolong sedikit di kabupaten ini. Dibandingkan data tahun sebelumnya, tenaga kesehatan di kabupaten Gayo Lues sudah lebih baik. Hal ini dapat dilihat dengan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap kecamatan minimal satu orang Doctor umum.

Tabel 4.10

## Tenaga Medis Kabupaten Gayo Lues Pada Tahun 2016

Kecamatan		Dokter	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Kesehatan Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kuta Panjang	4	9	5	1	0
2.	BlangJerango	2	10	9	0	0
3.	Blangkejeren	4	21	15	2	0
4.	Putri betung	3	12	1	0	0
5.	Dabun Gelang	3	16	13	4	0
6.	Blang Pegayon	2	15	11	3	0
7.	Pining	4	14	6	0	0
8.	Rikit Gaib	3	5	6	0	0
9.	Pantan Cuaca	2	8	1	1	0
10.	Terangun	4	10	3	0	0
11.	Tripe Jaya	2	3	3	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2016</b>	<b>33</b>	<b>123</b>	<b>73</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>2015</b>	<b>26</b>	<b>110</b>	<b>155</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan dan tenaga kesehatan masih sangat sedikit, sehingga diperlukan tenaga penambahan sarana kesehatan dan penambahan tenaga kesehatan untuk meningkatkan penanganan bagi penderita atau pasien, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Dengan membaiknya derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh baiknya sarana dan prasarana kesehatan diharapkan akan menambah kualitas bagi penduduk Gayo Lues menjadi semakin baik.

### G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi

tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran.

## **1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

### **a. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

### **b. Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

### **c. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal



**Tabel 4.11**  
**IPM Kabupaten Gayo Lues dan Komponennya**  
**Tahun 2010 Sampai 2017**

<b>Tahun</b>	<b>IPM</b>	<b>AHH</b>	<b>AMS</b>	<b>HLS</b>	<b>Pengeluaran</b>
2010	60.93	64.24	12.66	5.59	7610.95
2011	61.91	64.31	12.77	6.24	7634.75
2012	62.85	64.38	12.89	6.88	7646.12
2013	63.22	64.42	13.01	7	7709.08
2014	63.34	64.44	13.03	7.04	7742.07
2015	63.67	64.77	13.13	7.06	7779.87
2016	64.26	64.88	13.27	7.1	8048.23
2017	65.01	64.98	13.28	7.39	8322.49

Pada tabel 4.1.1 di atas di lihat bahwa ada banyak perubahan IPM yang terjadi dari tahu ke tahu di perubahan ipm adalah bentuk hasil dari kinerja pemerintah dalam meningkatkan ipm dan sumber daya manusia yang ada di lihat di atas tidak terlalu banyak perubahan ipm yang terjadi perubahan IPM yang besar terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016 di mana pengeluaran drastis menurun dengan perbedaan angka yang relative menjauh

#### **4.2. Analisis dan Pembahasan**

##### **A. Menganalisis Sector Ekonomi Pada wilayah kabupaten gayo lues**

###### **menggunakan data**

Menganalisis sector ekonomi pada wilayah kabupaten gayo lues menggunakan data PDRB Kabupaten Gayo Lues PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2010-2017.

#### **4.2.1. Perkembangan Pada 7 Sector Pembangunan Di Kabupaten Gayo Lues Sebelum Dan Sesudah Dana Otonomi Khusus**

Aceh memiliki kesempatan yang besar dalam mengejar ketertinggalan pembangunan melalui Dana Otonomi khusus. Sejak tahun 2008 hingga 2015, Aceh telah menerima Dana Otsus sebesar Rp 41,49 triliun dan telah menjadi sumber penerimaan utama bagi pembangunan Aceh, dengan rata-rata peningkatan penerimaan pertahunnya, Selama 20 tahun jangka waktu berlakunya Dana Otsus, Aceh diperkirakan akan menerima sebesar Rp 163 triliun Hal ini memberikan kesempatan emas bagi Aceh untuk memacu pembangunan di masa mendatang.

Dana Otonomi Khusus merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberi kewenangan penuh untuk Pemerintah Provinsi dalam mengelola Dana Otsus dan dianggap sebagai sebagai penerimaan Pemerintah Aceh untuk membiayai program pembangunan. Pengelolaan Dana Otonomi sKhusus ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan daerah dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar Kabupaten/kota. Meskipun Pemerintah Pusat menyalurkan dana otonomi khusus melalui Pemerintah Provinsi, namun dana otonomi khusus juga merupakan penerimaan Kabupaten/kota.

Pemanfaatan dana Otsus yang dimulai sejak 2008 lalu, ternyata sebagian belum sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan atau rencana induk. Empat kabupaten di dataran tinggi Gayo, mulai dari Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan tuan rumah Bener Meriah. Di Kabupaten Gayo Lues mengalokasikan dana itu ke berbagai sector, dan setelah ada dana otonomi khusus

bagaimana perkembangan dari dari ke 7 sector di bawah sebelum dan sesudah ada dana otonomi khusus di Kabupaten Gayo Lues

### 1. Infrastruktur

Infrastruktur ialah sarana yang di buat untuk membantu mobilitas suatu kegiatan atau acara sebagai nya, di mana pemerintah daerah sangat membutuhkan yang nama nya infrastruktur untuk membangaun prekonomian di daerah tersebut karna infrastruk menjadi dasar percepatan prekonomian di mana banyak di alokosikan dana untuk infrastruktur jumlah dana otonomi khusus yang di alokasikan

Panjang jalan

**Tabel 1**

**Infrastruktur Kondisi Panjang Jalan Dari Tahun 2007 -2012**

No	Tahun	Panjang jalan km	Kondisi jalan Baik km	Kondisi jalan Sedang km	Kondisi jalan rusak km
1	2007	487.83	146.47	239.41	101.55
2	2008	528.37	335.79	102.58	92.00
3	2009	701.67	556.36	80.56	64.75
4	2010	825.78	564.51	131.70	129.32
5	2011	939.53	710.45	99.35	129.35
6	2012	1.227.54	796.43	169.51	145.06

Dari data di atas dapat di analisis bahwa perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Gayo Lues sebelum dana Otonomi Khusus dan sesudah Otonomi Khusus mengalami peningkatan dari pada pembanguna dan perbaikan jalan. Di

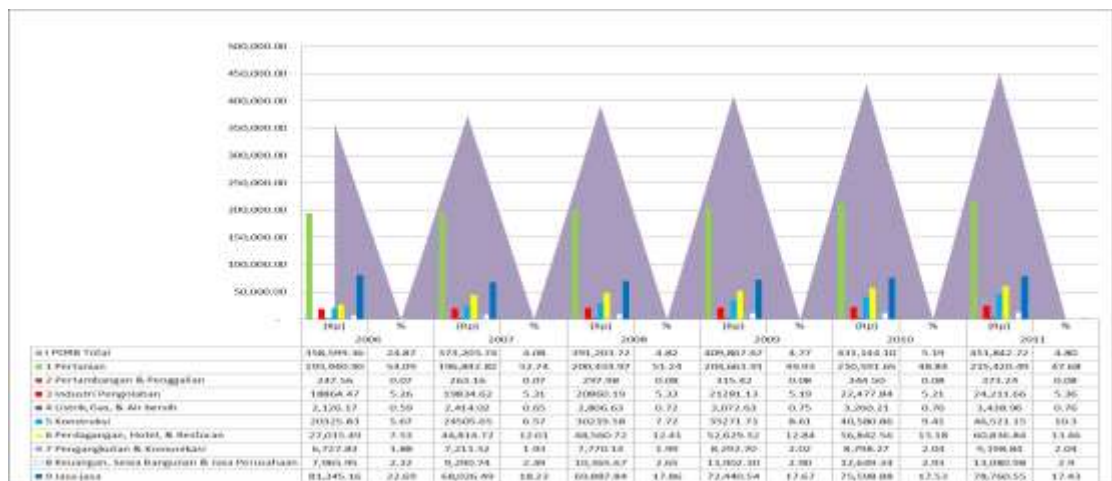
ambil data sebelum dana Otonomi Khusus yaitu dari tahun 2007-2008 dan data setelah terjadi dana otonomi khusus yaitu pada tahun 2009-2011

Mengalami peningkatan yang baik seperti dapat kita lihat pada table di atas yang mengalami kenaikan yang baik di lihat dari bertambah nya panjang jalan yang di bangun

## 2.Preekonomian

Ekonomi ialah aktiitas manusia yang berhubungan dengan produksi ,distribusi,dan konsumsi. DI lihat dari penertian ekonomi maka Gayo Lues di bilang masih tertinggal dengan keadaan kabupaten kota lain yang satu Provinsi Aceh maka dari Kabupaten Gayo Lues perlu meningkat kan pertumbuhan ekonomi nya di lihat melalui PDRB yang ada

**Gambar 2**  
**PDRB Kabuupaten Gayo Lues Dari Tahun 2006-2011**



Pada tabel di atas dapat di lihat dari beberapa pendapatan di ambil garis besar keseluruhan total PDRB yang di dapat sebelum dana Otonomi Khusus yaitu pada tahun 2006- 2008 dan sedangkan periode sesudah dana otonomi

husus pada tahun 2009-2011 jika dilihat dari perubahan pdrb sebelum dan sesudah dana Otonomi Khusus maka perubahan yang terjadi pada pdrb kabupaten Gayo Lues masih di bilang stabil karna terjadi naik turun setiap tahunnya dan naik, turunan nya pun masih relatip sedikit

### 3.Kemiskinan

Kemiskinan ialah kondisi di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan pakaian tempat berlindung. Oleh sebab itu pemerintah perlu menjaga pemerataan penduduk dengan mengurangi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara meningkat kan kesejahteraan social biar hidup layak agar tidak hidup di garis kemiskinan lagi. Inilah gambar presentase kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh.

**Gambar 3**

**Peresentase Tingkat Kemiskinan Yang Terjadi Di Gayo Lues Dari Tahun 2006-2012**



Dari gambar persentasi di atas dapat di lihat persentase garis kemiskinan di Aceh dan Gayo Lues dari tahun 2006-2012 di mana banyak mengalami

penurunan tingkat kemiskinan di mana artinya jika mengalami penurunan pada tingkat kemiskinan berarti pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan baik itu persentasenya banyak maupun sedikit oleh sebab itu dari gambar di atas penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2007 turun 32,31 menjadi 26,57 pada tahun 2008 dan menjadi 24,91 pada tahun 2009.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu pendukung utama dalam perkembangan pembangunan manusia dan juga keberhasilan pendidikan juga dikaitkan dengan

Angka Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Gayo Lues Dari Tahun 2007-2012 keberhasilan perkembangan suatu daerah yang baik maka dari itu pemerintah perlu mementingkan tingkat pendidikan yang baik

**Tabel 4**  
**Angka Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Gayo Lues Dari Tahun 2007-2012**

No	Tahun	Tidak ada ijazah	Sekolah dasar(SD)	Sekolah menengah pertama(SMP)	Sekolah Menengah Atas(SMA)	Universitas
1	2007	26.66	18.08	12.72	13.42	452
2	2008	21.34	18.27	14.78	15.28	562
3	2009	21.00	19.58	13.27	14.25	703
4	2010	15.71	19.11	14.69	17.34	903
5	2011	13.54	17.87	15.56	20.34	1.253
6	2012	12.37	12.92	15.71	31.24	1.415

Pada tabel di atas di analisis bahwa banyak perubahan yang terjadi pada pendidikan Kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun secara berangsur membaik dan meningkat taraf masyarakat yang mempunyai ijazah jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari tahun 2007 sampai 2012 telah dilihat datanya di mana pengurangan tingkat orang yang tidak mempunyai Ijazah mulai berkurang dari tahun ini artinya banyak perkebangan yang terjadi dari tahun ke tahun, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas semakin meningkat. tapi peningkatan yang paling di harapkan pemerintah yaitu meningkatnya masyarakat yang mempunyai Ijazah Universitas yang di berarti sumberdaya manusia yang ada semakin banyak.

## **5.Sosial**

Dalam hidup bersosial pemerintah daerah juga perlu mengatur tentang bersosial bagi masyarakat di suatu daerah, di mana di Kabupaten Gayo Lues juga mengatur bagaimana bersosial maka di bentuk lah dinas sosial di kabupaten gayo lues yang di mana bertujuan untuk membantu masyarakat yang ada di daerah kabupaten gayo dengan melalui beberapa kebijakan yang di buat bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan dari rakyat itu sendiri

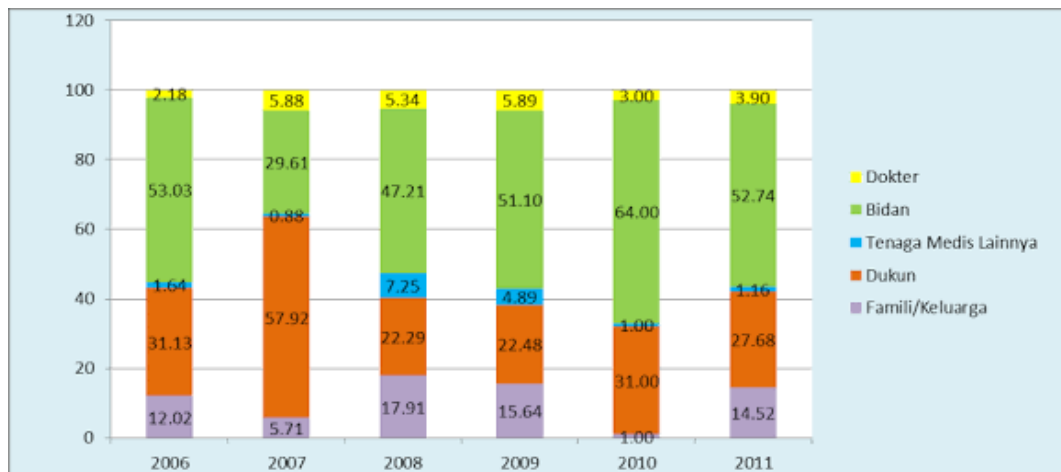
## **6.Kesehatan**

Dalam menjamin kualitas hidup yang baik bagi masyarakat nya pemerintah perlu memperhatikan kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan hidup sehat bagi masyarakat nya dengan mengadakan prasarana dan program kesehatan yang telah di siapkan dan di atur di pemerintahan agar tercipta nya hidup yang

sehat di Kabupaten Gayo Lues. Dan sangat perlu nya dukungan dari dukungan dari para pekerja medis

**Gambar 6**

**Tentang Kondisi Tenaga Medis Di Gayo Lues Dari Tahun 2006-2011**



Dari gambar grafik tentang kesehatan di kabupaten gayo lues di lihat dari berbagai sisi kesehatan dan perubahan yang terjadi yang di perlukan ialah tenaga medis kesehatan dari gambar table di atas kita bias melihat perubahan tenaga medis setelah dan sesudah dana Otonomi Khusus di jalan kan sebelum Otonomi Khusus pada tahun 2006-2008 dan sesudah dana Otonomi Khusus 2009-2011 maka dari itu ada 5 tenaga medis yang di kelompokkan

- 1.doctor
- 2.bidan
- 3.tenga medis lain nya
- 4.Dukun.
- 5.keluarga



## **7.Keistimewaan Kabupaten Gayo Lues (syariat islam)**

Syariat Islam pemerintah Aceh, Pemerintah Gayo Lues komitmen “Menjalankan Syariat Islam Secara Kaffah”, karena dengan mengarahkan pola pikir dan budaya hidup Islami masyarakat akan hidup damai, sehat, cerdas sehingga sejahtera. Nilai-nilai tersebut sudah diteladankan Rasulullah Muhammad S.A.W. Secara etimologis yang dimaksud “syari‘at” adalah jalan atau rute yang ditetapkan oleh agama Islam yang harus diacu atau dirujuk (Masykuri Abdillah dkk, hlm 157). Menurut istilah “syari‘at Islam” adalah apa yang disyari‘atkan oleh Allah SWT dalam Al Qur‘an dan dicontohkan oleh rasul-Nya Muhammad SAW dalam hadis dan harus diikuti oleh setiap muslim. Ajaran-ajaran yang tertuang dalam syari‘at itu tidak semata-mata hanya mengenai hubungan manusia (hamba) dengan tuhanNya, akan tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan alam serta manusia dengan manusia. Dengan demikian syari‘at mencakup ajaran yang terkait dengan aqidah (keyakinan/keimanan), akhlak (etika), ibadah (hubungan manusia dengan tuhanNya) serta muamalat (hubungan manusia dengan manusia-sosial kemasyarakatan dan dengan alam sekitar). Dari syari‘at itu dikembangkan hukum-hukum yang berlaku dalam situasi konkret (fiqh) dengan pendekatan-pendekatan sistematis, sosiologis serta tujuan (kemaslahatan, keadilan maupun

kepatuhan kepada Allah SWT) baik secara perorangan maupun kelompok (ijtima’y). Bidang inilah yang termasuk pengertian syari‘at dalam arti sempit. Sejauh ini program untuk pelaksanaan Syari‘at Islam di Kabupaten Gayo Lues masih dalam ruang lingkup pembinaan desa percontohan, peningkatan kapasitas petugas WH dan TP2K, pelayanan pengantaran jama‘ah haji, pelaksanaan

musabaqah. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi baru melaksanakan penataan, pembentukan dan pemberdayaan Baitul Mal yang dilakukan tahun 2007, 2008 dan 2009. Anggaran yang dialokasikan ke Dinas Syari'at Islam relatif lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa SKPK lain. Kenyataan ini memberi gambaran bahwa pemerintah daerah menganggap pelaksanaan Syari'at Islam sudah mandiri. Di sisi lain, pemerintah daerah dipandang masih perlu memperhatikan pentingnya mendukung Dinas Syari'at Islam dalam memberikan kontribusi kepada pengelolaan pemerintah. Misalnya dalam hal penetapan peraturan, seharusnya lebih banyak mempertimbangkan hukum-hukum yang dijabarkan dalam ilmu hukum Islam, baik masalah hukum, perekonomian, penataan ruang, sosial dan budaya.

#### 4.3 Analisis Sector Ekonomi Basic Di Kabupaten Gayo Lues

**Tabel 4.3**

**PDRB Kabupaten Gayo Lues Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2010-2017 (Jutaan Rupiah)**

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	588503.8	609949.79	638362.31	650077.09	667101.93	693532.62	720292.35	786380.55
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	488877.27	508669.7	535929.89	544211.9	559388.39	581023.69	598187.53	661640.12
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	64527.8	64738.48	64735.13	67215.01	67975.26	71584.74	79850.6	82325.97
3. Perikanan	35098.73	36541.6	37697.3	38650.18	39738.28	40924.19	42254.23	42414.47
B. Pertambangan dan Pengalihan	426585.29	45504.88	49635.53	53541.57	54803.72	49267.29	45121.77	34815.96
C. Industri Pengolahan	141606.72	149254.75	158245.18	162371.02	168315.76	175149.15	185457.59	199889.32
D. Pengadaan	1017.02	1091.81	1194.48	1268.77	1347.32	1460.15	1643.07	1739.33

Listrik dan Gas								
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	255.64	271.74	286.62	311.1	339.85	364.14	394.43	428.05
F. Konstruksi	114905.01	128240.6	141779.74	153055.76	165840.52	174474.76	182046.97	167098.07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	144541.85	151464.87	162273.04	173618.08	184571.87	193566.94	204707.45	206623.91
H. perdagangan hotel dan restoran	33918.69	35680.74	38044.9	40435.2	42108.08	43541.2	44571.8	45975.79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6373.16	6592.31	6853.04	7095.69	7350.39	7746.6	8270.8	12596.61
J. Informasi dan Komunikasi	20716.73	21466.8	21936.16	22370.16	22827.74	23630.88	24625.74	25589.66
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11794.93	12563.69	13396.86	16043.34	17365.52	18135.43	19069.22	19928.76
L. Real Estate	41226.38	42550.91	44795.81	46574.47	48663.96	50742.47	53218.71	56601.69
M,N. Jasa Perusahaan	1929.06	1964.17	2053.81	2120.72	2202.78	2258.68	2340.44	2423.61
O. pengakutan dan komunikasi	311495.24	152769.77	154222.03	157525.86	159595.31	167529.22	176976.64	187971.25
P. Jasa pendidikan	223918.24	37373.1	39347.47	41616.16	43888.64	45542.22	47969.62	50790.37
Q. pengakutan dan komunikasi	434701.22	49971.14	52858.26	56099.69	59104.91	61892.71	65952.87	69390.35
R,S,T,U. Jasa	245882.62	466046	60733.4	61635.1	31940.5	247163	724494	76887.3
PDRB	1389536.6	1452757.23	1531658.63	1590759.84	1652368.85	1715997.78	1790153.03	1876130.6

Pada periode sebelum otonomi khusus daerah (tahun 2010-2017), PDRB Kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010, PDRB Kabupaten Gayo Lues menunjukkan angka sebesar Rp 1.389.536.600.000, naik Rp 1.876.130.600.000 dari tahun sebelumnya (tahun 2010= Rp Rp 1.389.536.600.000). Sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Gayo Lues adalah sektor pertanian. Pada tahun 2000, output dari sektor pertanian sebesar Rp 7.863.805.500, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2010= Rp 5.885.038.000).

Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Gayo Lues adalah: Sektor perdagangan, hotel dan restoran

- 1) Sektor industri pengolahan
- 2) Setor jasa-jasa
- 3) Sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan.

Nilai dari keempat sektor ini dan sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi kecil bagi perekonomian Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2010 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Perkembangan pendapatan per kapita juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, pendapatan per kapita meningkat sebesar Rp 72.531.460 dari tahun sebelumnya (2010=Rp 2.215.013.910). Rata-rata pendapatan per kapita periode sebelum otonomi khusus daerah adalah sebesar Rp 2.166.762.974. Pada periode selama pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2010-2017), PDRB Kabupaten Gayo Lues juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dilihat dari kontribusi per sektor ekonomi maupun dari total PDRB. PDRB yang dihasilkan bahkan lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelum otonomi khusus daerah. Sektor pertanian tetap merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Kabupaten Gayo Lues. Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB atau perekonomian Kabupaten Gayo Lues adalah:

- 1) sektor industri pengolahan
- 2) sektor perdagangan, hotel, dan restoran
- 3) sektor industri pengolahan

- 4) sektor jasa-jasa
- 5) sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan

Perkembangan pendapatan per kapita juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, pendapatan per kapita meningkat sebesar Rp 831.708.940 dari tahun sebelumnya (2010=Rp 3.702.154.450). Rata-rata pendapatan per kapita periode setelah pelaksanaan otonomi khusus daerah adalah sebesar Rp 3.381.532.687, lebih tinggi dibanding pada periode sebelum otonomi khusus daerah.

Pada periode sebelum otonomi khusus daerah (tahun 2010-2017), PDRB Propinsi Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dilihat dari tiap sektor ekonomi maupun total PDRB. Pada tahun 2010, PDRB Propinsi Aceh menunjukkan angka sebesar Rp 131.571.455.028.000.000, naik Rp 18.297.898.421.000.000 dari tahun sebelumnya (tahun 2010 = Rp 113.273.556.607.000.000). Sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Propinsi Aceh adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun 2000, output dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 37.070.879.889.000.000, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 1999= Rp 32.577.803.253.000.000). Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Propinsi Aceh adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa.

Periode setelah pelaksanaan otonomi khusus daerah (tahun 2010-2017), PDRB Propinsi Aceh dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan, baik dilihat dari per sektor ekonomi maupun total PDRB. Pada tahun 2010, PDRB Propinsi Aceh menunjukkan angka sebesar Rp

314.938.944.153.000.000, naik Rp 53.170.875.877.000.000 dari tahun sebelumnya (tahun 2005= Rp 261.768.068.276.000.000). Sektor industri pengolahan tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Propinsi Aceh setelah pelaksanaan otonomi daerah. Pada tahun 2017, output dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 102.160.171.537.000.000, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2012= Rp 261.768.068.276.000.000). Sektor ekonomi lain yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Propinsi Aceh adalah:

- 1) sektor pertanian
- 2) sektor perdagangan, hotel dan restoran
- 3) sektor jasa-jasa
- 4) sektor pengangkutan dan komunikasi
- 5) sektor bangunan
- 6) sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan

Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik, gas, dan air bersih masih tetap memberikan kontribusi kecil bagi perekonomian atau PDRB Propinsi Aceh.

*Location Quotient* (LQ). Analisis LQ diperlukan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi di daerah penelitian dan membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peran kegiatan ekonomi sejenis pada lingkup yang lebih luas (Provinsi).

$$LQ = (X_i / X) / (Y_i / Y)$$

Keterangan :

LQ : *location quotient*

Xi : nilai tambah sektor i di Kabupaten Gayo Lues

X : total PDRB Kabupaten Gayo Lues

Yi : nilai tambah sektor i di Kabupaten Gayo Lues

Y : total PDRB Kabupaten Gayo Lues

Dengan mengetahui batas nilai basis 1,00 ke atas di katakan basis jika di bawah 0.99 ke bawah di katakan tidak basis, pencarian di lakukan dengan program excel dengan cara =(kolom Xi : nilai tambah sektor i di Kabupaten Gayo Lues /baris X : total PDRB Kabupaten Gayo Lues) /(kolom Yi : nilai tambah sektor i di Kabupaten Gayo Lues/baris Y : total PDRB Kabupaten Gayo Lues) seperti contoh:

A1:Xi : nilai tambah sektor i di Kabupaten Gayo Lues

A11:X : total PDRB Kabupaten Gayo Lues

B1:Yi : nilai tambah sektor i di Kabupaten Gayo Lues

B11:Y : total PDRB Kabupaten Gayo Lues

=(A1/A11)/(B1/B11)/(C1/C11)/(D1/D11)/(E1/E11)/(F1/F11)/(G1/G11)/(H1/H11)/(I1/I11)Lalu tekan enter maka akan keluar nilai dari LQ nya untuk mengetahui apakah sektor basis atau tidak basis

1.Pertanian

2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

5.Bangunan/Konstruksi

6. Bangunan/Konstruksi

7. Perdagangan, Hotel dan Restoran

8. Pengangkutan dan Komunikasi

9. Pengangkutan dan Komunikasi

10. Jasa-Jasa

**Tabel 4.3**

**Tabel hasil Analisis LQ PDRB dari tahun 2010-2017**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Hasil
2	588503	609950	638362	650077	667101	693533	720292	786381	216.223174
3	426585	45504.9	49635.5	53541.6	54803.7	49267.3	45121.8	34816	91.875996
4	14160.6	149255	158245	162371	168316	175149	185458	199889	37.864297
5	240170	1091.81	1194.48	1268.77	1347.32	1460.15	1643.07	1739.33	178.324535
6	5525.6	271.74	286.62	311.1	339.85	364.14	394.43	428.05	45.253253
7	311495	128241	141780	153056	165841	174475	182047	167098	82.759459
8	223918	35680.7	38044.9	40435.2	42108.1	43541.2	44571.8	45975.8	61.849543
9	434701	152770	154222	157526	159595	167529	176977	187971	173.453429
10	245882	466046	60733.4	61635.1	31940.5	247163	724494	76887.3	123.968486
11	1389537	1452757	1531659	1590760	1652369	1715998	1790153	1876131	

**Tabel 4.4**

**Hasil Analisis LQ Kabupaten Gayo Lues**

**pada Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Khusus**

Lapangan Usaha	Setelah Pelaksanaan Otonomi Khusus	
	LQ	Nominal
Pertanian	2,16	Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,91	Non Basis
Industri Pengolahan	0,37	Non Basis
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,78	Basis
Bangunan/Konstruksi	0,45	Non Basis
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,82	Non Basis
Pengangkutan dan Komunikasi	0,61	Non Basis
Pengangkutan dan Komunikasi	1,73	Basis
Jasa-Jasa	1,23	Basis



Berdasarkan hasil analisis LQ di Kabupaten Gayo Lues diperoleh bahwa Dikatakan basis nilai lebih dari 100.000000 (1,00) jika diwah nilai 99.000.000 (99.0) maka di katakana tidak basis,pada periode sebelum otonomi khusus daerah (2010-2017), sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; dan sektor jasa-jasa merupakan sektor yang potensi perkembangannya lebih cepat dibandingkan daerah lain di Propinsi Aceh. Sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menjadi sektor yang unggul dalam persaingan di masa depan. Pada periode setelah pelaksanaan otonomi khusus daerah (2010-2017),sektor ekonomi di Kabupaten Gayo Lues yang potensi perkembangannya lebih cepat dibandingkan daerah lain di Propinsi Aceh adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menjadi sektor yang unggul dalam persaingan di masa depan. Dari uji LQ dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang non basis (hasil uji LQ), menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Beberapa sektor ekonomi yang pada periode sebelum otonomi khusus daerah (2010-2017) diharapkan mampu menjadi sektor yang unggul dalam persaingan di masa depan, ternyata mengalami pertumbuhan melambat pada periode setelah pelaksanaan otonomi khusus daerah (2010-2017). Sektor tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor yang mengalami perkembangan cepat adalah sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa di Kabupaten Gayo Lues setelah diterapkannya otonomi khusus, terdapat perubahan dalam kenaikan nilai persentase yang meningkat dalam sektor unggulan dan kegiatan ekonomi yang potensial baik ditingkat propinsi Aceh maupun di Kabupaten Gayo Lues. Ekonomi potensial untuk di kembangkan di Kabupaten Gayo Lues mengalami perubahan baik pada era setelah Otonomi Khusus.
2. Berdasarkan Analisis pada periode setelah otonomi khusus, sektor-sektor ekonomi unggulan Kabupaten Gayo Lues adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.
3. Berdasarkan setelah otonomi khusus, Kabupaten Gayo Lues memiliki sector yang secara relatif menonjol dalam sektor-sektor ekonomi dibandingkan dengan Propinsi Aceh. Sehingga dalam angka pertumbuhan yang menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gayo Lues di lihat dalam persentase mengalami perubahan dari segi pendapatan dan proses pengolahan setelah otonomi khusus.
4. Dari 7 sector yang di lihat perkembangannya ada beberapa sector yang mengalami perubahan kenaikan dan penurunan dan ada juga perubahan yang relatif rata atau tidak terlihat menonjol, yang relatif memberikan angka yang baik yaitu di sector.

- a. Infrastruktur meningkat dari tahun 2007-2011(baik)
  - b. Kemiskinan menurun dari tahun 2007-2001(baik)
  - c. Pendidikan meningkat dari tahun 2007-2011(baik)
  - d. Kesehatan meningkat dari tahun 2006-2011(baik)
5. Perubahan pada perekonomian di lihat dari terjadi kenaikan persentase hasil dari beberapa sector ekonomi Kabupaten Gayo Lues berjalan berangsur-angsur membaik dari sebelum dana Otonomi Khusus ke sesudah Otonomi Khusus dengan demikian dana Otonomi Khusus memberikan dana tambahan daerah membuat perekonomian Kabupaten Gayo Lues menjadi lebih baik
  6. Untuk sector social dan sector keistimewanan tidak dapat di hitung

## 5.2 Saran

- Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor yang tertinggal di Kabupaten Gayo Lues, agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk kebijakan pengembangan sektor tersebut di masa depan.
- Kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah hendaknya disamping memprioritaskan pada sektor dan subsector unggulan (kontribusi (+) dan pertumbuhan (+) yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, juga memperhatikan sektor dan subsektor yang sebenarnya unggul namun memiliki pertumbuhan yang rendah (kontribusi (+) dan pertumbuhan (-), yaitu sektor pertanian, sector keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa untuk bisa dipacu pertumbuhannya.

- Untuk sektor listrik, gas dan air bersih pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan dalam hal pelanggaran misal pencurian air, pencurian atau penyalahgunaan pemakaian listrik dan sebagainya. Untuk sektor pertanian, pemerintah daerah dapat meningkatkan penyuluhan-penyuluhan pertanian serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan penurunan hasil pertanian akibat bencana alam, misal banjir.
- Untuk sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan pemerintah daerah sebaiknya membuat suatu kebijakan yang intinya mempermudah mempersingkat syarat-syarat serta birokrasi dalam pemanfaatan fasilitas. Dalam sektor jasa-jasa sebaiknya dilakukan peningkatan pelayanan kepada konsumen sehingga mereka nyaman dalam menggunakan fasilitas jasa tersebut. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hendaknya lebih menggali potensi pengembangan sektor pertanian, meskipun sektor pertanian memiliki kontribusi besar namun memiliki kecenderungan menurun.
- Dengan bertambahnya nilai pertumbuhan sektor pertanian ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor yang lain terutama di bidang industri, mengingat di Kabupaten Gayo Lues terdapat banyak industri makanan dan minuman. Selain itu, dengan mantapnya sektor pertanian juga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Gayo Lues.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mundrajat Kuncoro, (2000) *Otonomi Dan Pembanguna Daerah Erlangga: Jakarta*
- Arsyad , L. (2002).*pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah Edisi kedua*. yogyakarta :BPFE
- Suparmoko.2008.*Ekonomika Pembangunan Edisi Ke Enam*.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Tri Basuki Agus dan Prawoto Nano , 2014,*Pengantar Teori Ekonomi*, Mitra Pustaka Mandiri(MATAN), Yogyakarta
- Todaro, Michael P. dan Stephen C.2006. *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan,JilidI)*. Jakarta :Erlangga
- Ricardo David .1917. *Teori pertumbuhan klasik* PT. Raja Grafindo Pustaka . Jakarta
- Lewis Arthur,1954. *Economic development with unlimited supplies and labour* Manchester School England
- Domar Harrod , 1957. *Model pertumbuhan ekonomi* PT. Raja Grofindo Jakarta
- Hudiyanto, 2015, *Ekonomi Pembangunan*. Pusat Pengembangan Ekonomi Universitas Muhamddyah Yogyakarta. Yogyakarta
- Schumpeter Joseph. (1911). *Theory of Economic Development* . Business Cycles Inggris 1934
- [Www.Bps Gayo Lues.co.id](http://www.bps.gayo.lues.co.id) Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2006-2017
- [Www.Bps Gayo Lues.co.id](http://www.bps.gayo.lues.co.id) Indek Pembangunan Manusia 2006-2017